

# *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025*



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya  
2026

## KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja OPD kepada Bupati dan kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu DKPP untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil analisis capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK) dan indikator kinerja sub kegiatan (IKSK) dibandingkan terhadap target kinerja tahun 2025.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi bahan evaluasi yang objektif untuk menata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Sungai Raya, 05 Januari 2026  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197405202000031005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	2
3. Tugas Pokok Fungsi.....	4
3.1. Kepala Dinas.....	4
3.2. Sekretariat.....	5
3.3. Bidang Ketahanan Pangan.....	6
3.4. Bidang Tanaman Pangan.....	7
3.5. Bidang Hortikultura .....	7
3.6. Bidang Penyuluhan .....	8
3.7. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian .....	9
3.8. Unit Pelaksana Teknis.....	9
3.9. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) .....	9
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	11
5. Sumber Daya Lahan .....	21
6. Sumber Daya Keuangan .....	23
7. Sarana dan Prasarana .....	28
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	32
A. Rencana Strategis.....	32
Sumber: Renstra DKPP 2025-2026 .....	33
1. Visi .....	33
2. Misi.....	34
3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	34
B. Perjanjian Kinerja .....	35
1. Perjanjian Kinerja Eselon II .....	35

2. Perjanjian Kinerja Eselon III .....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	38
A. Capaian Kinerja .....	38
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini ..	39
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	46
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	48
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional .....	51
5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	52
B. Realisasi Anggaran .....	57
BAB IV PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran. ....	62
LAMPIRAN .....	64
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Murni TA 2025 .....	64
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2025 .....	85
Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2025 .....	106
Lampiran 4. BA Pembahasan LKJIP TA 2025 .....	113
Lampiran 5. SK IKU, IKK dan IKSK .....	115
Lampiran 6. Perhitungan IKU .....	127
Lampiran 7. Kertas Kerja Koreksi LKJIP Tahun 2025 .....	136
Lampiran 8. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun Lalu .....	138

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data ABK dan Bezetting Pegawai Tahun 2025 .....	11
Tabel 1.2. Pegawai Dinas Berdasarkan Pendidikan.....	16
Tabel 1.3. Pegawai Berdasarkan Golongan.....	17
Tabel 1.4. Pegawai Dinas Berdasarkan Jabatan .....	18
Tabel 1.5. Jumlah dan Kelas Kelompok Tani .....	19
Tabel 1.6. Data Rasio Kelompok Tani dan Penyuluh Lapangan .....	20
Tabel 1.7. Luas Lahan Pertanian Berdasar Kecamatan.....	21
Tabel 1.8. Sumber Daya Keuangan Tahun 2025 .....	23
Tabel 1.9. Sarana dan Prasarana Tahun 2025 .....	28
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026.....	33
Tabel 2.2. Tujuan dan Indikatornya .....	34
Tabel 2.3. Target Kinerja Eselon II .....	35
Tabel 2.4. Target Kinerja Eselon III .....	36
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	38
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	39
Tabel 3.3. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2025 .....	41
Tabel 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
Tabel 3.5. Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	44
Tabel 3.6. Capaian Kinerja PDRB .....	46
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Skor PPH .....	47
Tabel 3.8. Capaian Kinerja SAKIP .....	48
Tabel 3.9. Target Kinerja SAKIP Sampai Akhir Renstra .....	48
Tabel 3.10. Target Kinerja PDRB Sampai Akhir Renstra .....	49
Tabel 3.11. Target Kinerja Penganggaran OPD .....	50
Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan PDRB .....	51
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi .....	3
Gambar 1.2. Peta Jabatan .....	16
Gambar 1.3. Lahan Sawah Kabupaten Kubu Raya .....	22
Gambar 3.1. Diagram Bar PDRB 2020-2024 .....	52

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82) dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi Pemerintah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025, adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2. Mewujudkan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
4. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

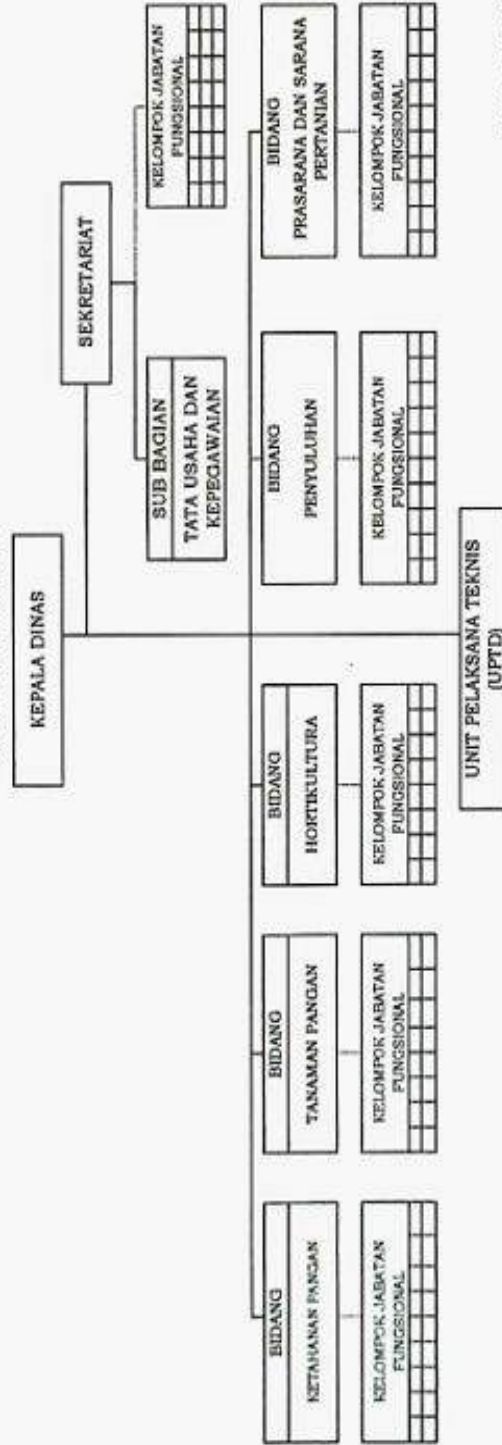
## **2. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian.  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura.
- f. Bidang Penyuluhan.
- g. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 105 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ttid

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 105

BUPATI KUBU RAYA,

ttid

MUDA MAHENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

SRI KUSASTUTI

### **3. Tugas Pokok Fungsi**

Tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya saat ini mengacu kepada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pangan, dan urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan bidang pertanian.

Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dibidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
- d. pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan program bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Dinas;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Ketahanan Pangan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang keersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pengendalian kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.4. Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, serta perlindungan tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Tanaman Pangan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Tanaman Pangan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, serta perlindungan tanaman pangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan dibidang Tanaman Pangan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.5. Bidang Hortikultura**

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura, serta perlindungan tanaman hortikultura. Bidang Hortikultura dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- h. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Hortikultura;
- a. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Hortikultura sesuai lingkup tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura, serta perlindungan tanaman hortikultura;
- c. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian kegiatan dibidang Hortikultura;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Hortikultura; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.6. Bidang Penyuluhan**

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang program dan evaluasi, penyelenggaraan penyuluhan, serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan. Bidang Penyuluhan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Penyuluhan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Penyuluhan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang program dan evaluasi, penyelenggaraan penyuluhan, serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan dibidang Penyuluhan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.7. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan dibidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.8. Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **3.9. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)**

Kelompok JF terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok JF yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan

pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok JF berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok JF untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator JF.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/ atau Sub Koordinator Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Kelompok JF yang diangkat melalui penyesuaian/ *inpassing* berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah JF ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam JF melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

Penetapan kelas JF yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. Dalam hal JF yang akan diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas JF tersebut.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Berdasarkan data analisis beban kerja (ABK) dan bazzeting pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai masih kekurangan karena beberapa formasi masih belum terisi dan masih ada yang kekurangan. Formasi yang masih kosong dan masih kurang seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1. Data ABK dan Bezetting Pegawai Tahun 2025

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Jabatan (Struktural/ Fungsional/ Pelaksana*)	Kebutuhan (ABK)	PNS	PPPK	CPNS	Honorrer/ Nama Lain	Jumlah	Kekurangan/ Kelebihan	Jumlah Pegawai Saat Ini Dibanding Kebutuhan (ABK)
1	Kepala Dinas	14	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
2	Sekretaris Dinas	12	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	Fungsional	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
4	Analisis Aset Negara	9	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
5	Analisis Barang Milik Negara	9	Fungsional	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
6	Analisis Standar Harga	6	Fungsional	2	0	0	0	1	1	-1	KURANG
7	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	6	Fungsional	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
9	Analisis Keuangan	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI

10	Perencana	9	Fungsional	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
11	Analisis Perencanaan Anggaran	8	Fungsional	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
12	Analisis Rencana dan Program Kegiatan	8	Fungsional	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
13	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	8	Fungsional	2	0	0	0	0	0	-2	KURANG
14	Bendahara	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
15	Verifikator Keuangan	6	Pelaksana	4	0	0	0	4	4	0	SESUAI
16	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
17	Petugas Keamanan	3	Pelaksana	1	0	0	0	2	2	1	LEBIH
18	Pramu Kebersihan	1	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
19	<b>Kepala Sub Bagian Usaha Dan Kepegawaian</b>	9	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
20	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	9	Fungsional	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
21	Analisis Jabatan	9	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
22	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	9	Fungsional	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
23	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	2	0	0	0	2	2	0	SESUAI
24	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	3	0	0	0	3	3	0	SESUAI
25	Pengadministrasian Umum	5	Pelaksana	1	0	0	0	2	2	1	LEBIH
26	<b>Kepala Bidang Tanaman Pangan</b>	11	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
27	Analisis Potensi Budidaya Serelia	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
28	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
29	Penata Dokumen Hasil Produksi Tanaman Pangan	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
30	Analisis Alsintan Tanaman Pangan	8	Fungsional	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
31	Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
32	Analisis Pengolahan Hasil Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI

33	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
34	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	9	Fungsional	4	4	0	0	0	4	0	SESUAI
35	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	8	Fungsional	1	2	0	0	0	2	1	LEBIH
36	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	7	Fungsional	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
37	Pengelola Data Pasca Panen	6	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
38	Pengelola Perlindungan Tanaman	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
39	Pengelola Teknologi POPT	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
40	<b>Kepala Bidang Hortikultura</b>	11	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
41	Analisis Pengolahan Hasil Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
42	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
43	Analisis Pesticida	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
44	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	Fungsional	2	2	0	0	0	2	0	SESUAI
45	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	Fungsional	2	2	0	0	0	2	0	SESUAI
46	Penata Dokumen Hasil Produksi Hortikultura	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
47	Pengelola Data Pasca Panen Hortikultura	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
48	Pengelola Keuangan	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
49	Pengelola POPT	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
50	Pengelola Pengendali Operasional	6	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
51	<b>Kepala Bidang Ketahanan Pangan</b>	11	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI

52	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	9	Fungsional	3	3	0	0	0	3	0	SESUAI
53	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
54	Analisis Pangan	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
55	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Fungsional	2	2	0	0	0	2	0	SESUAI
56	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	0	0	0	1	-1	KURANG
57	Pengawas Harga Pangan	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
58	Pengelola Keuangan Penyuluh Pangan	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
59	<b>Kepala Bidang Penyuluhan</b>	11	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
60	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11	Fungsional	22	12	0	0	0	12	-10	KURANG
61	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	Fungsional	26	12	0	0	0	12	-14	KURANG
62	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	Fungsional	50	13	11	0	2	26	-24	KURANG
63	Penyuluh Pertanian Mahir	7	Fungsional	9	7	0	0	0	7	-2	KURANG
64	Penyuluh Pertanian Terampil	7	Fungsional	11	4	4	0	2	10	-1	KURANG
65	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	Fungsional	5	1	0	0	1	2	-3	KURANG
66	Analisis Kapasitas Penyuluh	7	Pelaksana	2	0	0	0	0	0	-2	KURANG
67	Analisis Materi Penyuluh	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
68	Analisis Program Penyuluh	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
69	Analisis Program Kegiatan Pengembangan	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
70	Analisis Program Pembangunan Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
71	Pengelola Bahan Data Base Kelembagaan	6	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
72	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
73	<b>Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian</b>	11	Struktural	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
74	Pengawas Pengelola Lahan	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG

	Pertanian dan Air Irigasi										
75	Pengawas Pengairan	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
76	Analisis Pembiayaan Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
77	Surveyor Pemetaan	8	Fungsional	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
78	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
79	Analisis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
80	Analisis Lahan Pertanian	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
81	Pengawas Pengolahan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	7	Pelaksana	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
82	Analisis Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	9	Fungsional	1	1	0	0	0	1	0	SESUAI
83	Pengawas Pupuk dan Pestisida	7	Pelaksana	1	0	0	0	0	0	-1	KURANG
84	Analisis Pengembangan Kelembagaan Alsintan	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI
<b>JUMLAH</b>				<b>219</b>	<b>88</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>148</b>	<b>-71</b>	<b>KURANG</b>
<b>Tingkat Pemenuhan Pegawai</b>			-----							<b>67,58%</b>	

Sumber : Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya (2025)

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebanyak 10 jabatan struktural, terdiri dari: seorang Pejabat Eselon II.a (Kepala Dinas), seorang Pejabat Eselon III.a (Sekretaris), Kepala Bidang sebanyak 5 orang, dan Pejabat Eselon IV.a sebanyak 3 orang yaitu Kasubbag TU dan Kepegawaian DKPP, Kepala UPTD dan Kasubbag TU UPTD. Selain itu juga terdapat pejabat fungsional tertentu yang tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional. Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sampai Desember 2025 berjumlah 121 orang yang terdiri dari PNS, PPPK, Non ASN dan Outsorsing. Data kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan seperti tabel berikut.



Tabel 1.2. Pegawai Dinas Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	17	4	21
4	Diploma 1	0	0	0
5	Diploma 2	0	0	0
6	Diploma 3	9	5	14
7	Diploma 4	0	0	0
8	Sarjana Strata 1	34	27	61
9	Pasca Sarjana Strata 2	14	6	20
Jumlah		77	44	121

Sumber: Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai dengan kualifikasi pendidikan setara sarjana / diploma empat sangat mendominasi yaitu sebesar 54,55% (66 orang); kemudian disusul pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebesar 17,36% (21 orang); pegawai dengan kualifikasi pendidikan diploma tiga sebesar 11,57% (14 orang) dan terakhir pegawai dengan kualifikasi pendidikan strata dua sebesar 16,53% (20 orang). Jumlah pegawai DKPP berdasarkan kualifikasi pendidikan sarjana cukup dominan dengan demikian menjadi potensi yang cukup baik dalam mendukung kinerja OPD dalam mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai.

Tabel 1.3. Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan II	7	3	10
	II/a	4	1	5
	II/b	0	0	0
	II/c	2	0	2
	II/d	1	2	3
2	Golongan III	50	27	77

	III/a	17	11	28
	III/b	8	4	12
	III/c	7	5	12
	III/d	8	7	15
3	Golongan IV	13	7	
	IV/a	9	6	15
	IV/b	4	1	5
	IV/c	0	0	0
	IV/d	0	0	0
4	Non Golongan (Non ASN)	15	6	21
5	Outsorsing	2	1	3
	Jumlah	77	44	121

Sumber: Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai dengan kualifikasi golongan III sangat mendominasi yaitu sebesar 55,37% (67 orang); kemudian disusul pegawai dengan kualifikasi non golongan sebesar 17,35% (21 orang); pegawai dengan kualifikasi golongan IV sebesar 16,53% (20 orang), pegawai dengan kualifikasi golongan dua sebesar 8,26% (10 orang) dan pegawai outsorsing sebesar 2,48% (3 orang). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak memiliki pegawai dengan kualifikasi golongan satu. Jumlah pegawai DKPP berdasarkan kualifikasi golongan III dan IV cukup mendominasi dibandingkan dengan golongan II dan non golongan dengan demikian menjadi potensi yang cukup baik dalam mendukung kinerja OPD dalam mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai.

Tabel 1.4. Pegawai Dinas Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	Gol.	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural		8	2	10
		III	2	1	3
		IV	6	1	7
2	Pelaksana (Fungsional Umum)		5	3	8
		II	2	1	3
		III	3	2	5
		IV	0	0	0

3	Fungsional Tertentu		46	32	78
		II	4	2	6
		III	35	24	59
		IV	7	6	13
4	Tenaga Administrasi (Non ASN)		22	14	36
	Jumlah		84	50	134

Sumber: Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai dengan kualifikasi jabatan fungsional tertentu sangat mendominasi yaitu sebesar 57,45%; kemudian disusul pegawai dengan kualifikasi non ASN sebesar 29,79%; pegawai dengan kualifikasi jabatan struktural sebesar 7,09% dan terakhir pegawai dengan kualifikasi fungsional umum / pelaksana sebesar 5,67%. Jumlah pegawai DKPP berdasarkan kualifikasi fungsional tertentu dan pegawai struktural cukup mendominasi dibandingkan dengan non ASN dan fungsional umum dengan demikian menjadi potensi yang cukup baik dalam mendukung kinerja OPD dalam mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai.

Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 68 orang dari jumlah Desa sebanyak 120 Desa sehingga masih terdapat kekurangan PPL sebanyak 52 orang. PPL tersebar di 9 Kecamatan untuk melayani petani yang tergabung dalam Kelompok Tani. Saat ini Kelompok Tani yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1.678 kelompok. Data kelompok tani tersebut diambil dari SIMLUHTAN 2024.

Tabel 1.5. Jumlah dan Kelas Kelompok Tani

No	Kecamatan	Jumlah	Kelas Kelompok			
			Poktan	Pemula	Lanjut	Madya
1	Batu Ampar	168	116	34	15	0
2	Kuala Mandor B	72	43	22	2	0
3	Kubu	218	119	67	13	0
4	Rasau Jaya	123	27	58	26	5
5	Sungai Ambawang	284	248	28	1	0
6	Sungai Kakap	283	167	89	19	0
7	Sungai Raya	324	203	102	14	1
8	Teluk Pakedai	91	47	35	9	0

9	Terentang	115	60	46	3	0
	Jumlah	1.678	1.030	481	102	6

Sumber : Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)

Berdasarkan data tersebut maka terdapat empat Kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani paling banyak karena jumlahnya melebihi 200 kelompok yaitu Kubu, Sungai Ambawang, Sungai Kakap dan Sungai Raya. Keberadaan kelompok tani mengindikasikan banyaknya petani yang terdapat di Kecamatan tersebut atau dengan kata lain mata pencaharian petani banyak mendominasi di empat kecamatan tersebut.

Wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 120 WKPP yang tersebar dalam 9 Kecamatan. Jumlah PPL tidak sebanding dengan jumlah WKPP artinya masih terdapat WKPP yang belum memiliki PPL. Berdasarkan Gambar 2. Maka dapat dijelaskan bahwa warna hijau menunjukkan WKPP yang belum memiliki PPL, warna kuning adalah WKPP yang sudah memiliki PPL dari PNS dan warna merah menunjukkan bahwa WKPP yang sudah memiliki PPL dari Tenaga Harian Lepas (Kementan). Gambaran WKPP beserta keberadaan PPL (petugas penyuluh lapangan) dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 1.6. Data Rasio Kelompok Tani dan Penyuluh Lapangan

No	Kecamatan	Jumlah Poktan	PPL		Total PPL	Rasio Poktan / PPL
			PNS	THL		
1	Batu Ampar	168	5	2	7	24,0
2	Kuala Mandor B	72	4	2	6	12,0
3	Kubu	218	10	0	14	15,6
4	Rasau Jaya	123	3	2	5	24,6
5	Sungai Ambawang	284	7	1	8	35,5
6	Sungai Kakap	283	9	2	11	25,7
7	Sungai Raya	324	9	4	13	24,9
8	Teluk Pakedai	91	5	1	6	15,2
9	Terentang	115	5	5	10	11,5
	Jumlah	1.678	58	19	97	17,3

Sumber : Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)

## 5. Sumber Daya Lahan

Luas lahan pertanian di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya seluas 45.237 hektar. Lahan pertanian terbagi menjadi lima jenis yaitu kebun (lahan hortikultura tahunan); ladang (tanaman padi tahunan); sawah irigasi (lahan sawah tercakup daerah irigasi); sawah pasang surut; dan tegal (hortikultura semusim dan jagung). Luas lahan pertanian dapat dilihat pada tabel 1.7. berikut. Sedangkan gambaran spasial sawah dapat dilihat pada gambar 1.2.

Tabel 1.7. Luas Lahan Pertanian Berdasar Kecamatan

No	Kecamatan/ Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
1	Batu Ampar			550	5.163	192	5.905
2	Terentang	36			1.146	53	1.235
3	Kubu			313	4.917	549	5.780
4	Teluk Pakedai			26	2.227	174	2.427
5	Sungai Kakap	8.168			8.265	3.027	19.461
6	Rasau Jaya	15			928	1.072	2.015
7	Sungai Raya	156			4.057	1.792	6.005
8	Sungai Ambawang	98	161		460	647	1.366
9	Kuala Mandor B	28	13		778	225	1.043
	Total	8.501	174	890	27.941	7.732	45.237

Sumber: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)



## 6. Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.8. Sumber Daya Keuangan Tahun 2025

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Jumlah		19.448.050.988	DAU
2	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.168.298.391	DAU
3	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.725.158	DAU
4	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.031.379	DAU
5	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.973.240	DAU
6	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.720.539	DAU
7	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.825.619.274	DAU
8	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.810.572.169	DAU
9	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.047.105	DAU
10	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.860.210	DAU
11	2.09.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.860.210	DAU
12	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.336.300	DAU
13	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.942.495	DAU
14	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.045	DAU
15	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.617.000	DAU
16	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.396.415	DAU
17	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.381.345	DAU
18	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.488.482	DAU

19	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.512.692	DAU
20	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.139.175	DAU
21	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.045.776	DAU
22	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.553.850	DAU
23	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.315.018	DAU
24	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.921.971	DAU
25	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.172.899	DAU
26	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.172.899	DAU
27	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.976.451	DAU
28	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.709.960	DAU
29	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.266.491	DAU
30	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.119.617	DAU
31	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.994.158	DAU
32	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.877.459	DAU
33	2.09.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.418.000	DAU
34	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.830.000	DAU
35	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	76.758.744	DAU
36	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	76.758.744	DAU

		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
37	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76.758.744	DAU
38	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	140.852.481	DAU
39	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	66.344.156	DAU
40	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	43.565.026	DAU
41	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	5.416.592	DAU
42	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	11.651.617	DAU
43	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.710.921	DAU
44	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	74.508.325	DAU
45	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4.867.300	DAU
46	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69.641.025	DAU
47	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	433.672.860	DAU
48	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.520.342	DAU
49	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.520.342	DAU
50	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	422.152.518	DAU

51	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.118.362	DAU
52	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	143.373.185	DAU
53	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4.660.971	DAU
54	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.828.606	DAU
55	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.828.606	DAU
56	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.828.606	DAU
57	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	859.182.391	DAU
58	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	251.836.004	DAU
59	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.736.293	DAU
60	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	204.392.618	DAU
61	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	23.707.093	DAU
62	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	607.346.387	DAU
63	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	315.193.912	DAU
64	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	DAU
65	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	292.152.475	DAU
66	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.076.699.072	DAU

67	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	64.909.236	DAU
68	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	64.909.236	DAU
69	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.011.789.836	DAU
70	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	634.460.973	DAU
71	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0	DAU
72	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	186.228.754	DAU
73	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	191.100.109	DAU
74	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	551.936.971	DAU
75	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	551.936.971	DAU
76	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	472.949.205	DAU
77	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	78.987.766	DAU
78	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.104.821.472	DAU
79	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.104.821.472	DAU
80	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	460.395.620	DAU
81	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	43.461.503	DAU
82	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	21.552.751	DAU
83	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	174.425.949	DAU
84	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	404.985.649	DAU

Sumber : DPPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya TA 2025

## 7. Sarana dan Prasarana

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya memiliki sejumlah sarana dan prasarana / aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Perincian sarana dan prasarana yang digunakan sebagai berikut.

Tabel 1.9. Sarana dan Prasarana Tahun 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Regist	Cara Peroleh
1	1 3 2 01 01 01 001	Crawler Tractor + Attachment	000001 000008	Hibah & Pembelian
2	1 3 2 01 01 03 001	Crawler Excavator + Attachment	000001	Hibah
3	1 3 2 01 03 04 002	Portable Generating Set	000001	Pembelian
4	1 3 2 01 03 05 010	Pompa Air	000001	Pembelian
5	1 3 2 02 01 02 003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	000001 000003	Pembelian
6	1 3 2 02 01 03 002	Pick Up	000001	Pembelian
7	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	000001 000084	Pembelian
8	1 3 2 03 03 01 072	Global Positioning System	000001	Pembelian
9	1 3 2 03 03 17 038	Alat Penakar Hujan	000001	BMKG Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah
10	1 3 2 03 03 18 042	Soil Moisture Meter	000001	Pembelian
11	1 3 2 04 01 03 003	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	000001 000005	Hibah
12	1 3 2 04 01 03 004	Alat Pemipil Jagung	000001 000003	Hibah
13	1 3 2 05 01 02 002	Mesin Hitung Listrik	000001	Pembelian
14	1 3 2 05 01 02 003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	000001	Pembelian
15	1 3 2 05 01 03 017	Lain-lain (Alat Reproduksi)	000001 000002	Pembelian
16	1 3 2 05 01 04 001	Lemari Besi/Metal	000001 000004	Pembelian
17	1 3 2 05 01 04 003	Rak Besi	000001 000011	Pembelian
18	1 3 2 05 01 04 004	Rak Kayu	000001 000002	Pembelian
19	1 3 2 05 01 04 005	Filing Cabinet Besi	000001	Pembelian

20	1	3	2	05	01	04	007	Brandkas	000001		Pembelian
21	1	3	2	05	01	04	027	Lemari Kaca	000001		Pembelian
22	1	3	2	05	01	05	002	CCTV - Camera Control Television System	000001		Pembelian
23	1	3	2	05	01	05	002	CCTV - Camera Control Television System	000002		Pembelian
24	1	3	2	05	01	05	010	Alat Penghancur Kertas	000001		Pembelian
25	1	3	2	05	01	05	010	Alat Penghancur Kertas	000001		Pembelian
26	1	3	2	05	01	05	012	Mesin Absensi	000001		Pembelian
27	1	3	2	05	01	05	043	LCD Projector /Infocus	000001	000010	Hibah
28	1	3	2	05	01	05	076	Papan Nama Instansi	000001		Pembelian
29	1	3	2	05	01	05	081	Teralis	000001		Pembelian
30	1	3	2	05	01	05	089	Printer Multifungsi	000001	000009	Pembelian
31	1	3	2	05	02	01	002	Meja Kerja Kayu	000001	000066	Pembelian
32	1	3	2	05	02	01	008	Meja Rapat	000001		Pembelian
33	1	3	2	05	02	01	024	Meja 1/2 Biro	000001	000012	Pembelian
34	1	3	2	05	02	01	030	Kursi Rapat	000001	000210	Pembelian
35	1	3	2	05	02	01	031	Kursi Tamu	000001		Pembelian
36	1	3	2	05	02	01	032	Kursi Putar	000001	000027	Pembelian
37	1	3	2	05	02	01	033	Kursi Biasa	000001	000080	Pembelian
38	1	3	2	05	02	01	048	Sofa	000001	000002	Pembelian
39	1	3	2	05	02	04	001	Lemari Es	000001	000003	Pembelian
40	1	3	2	05	02	04	004	A.C. Split	000001	000013	Pembelian
41	1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	000001	000003	Pembelian
42	1	3	2	05	02	05	015	Rak Piring Alumunium	000001		Pembelian
43	1	3	2	05	02	06	002	Televisi	000001	000021	Pembelian
44	1	3	2	05	02	06	008	Sound System	000001	000022	Pembelian
45	1	3	2	05	02	06	012	Wireless	000001		Pembelian
46	1	3	2	05	02	06	014	Microphone	000001	000010	Hibah
47	1	3	2	05	02	06	021	Camera Video	000001	000020	Pembelian
48	1	3	2	05	02	06	032	Tiang Bendera	000001		Pembelian
49	1	3	2	05	02	06	038	Dispenser	000001	000006	Pembelian
50	1	3	2	05	03	01	004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	000002	Pembelian

51	1	3	2	05	03	01	005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001	000003	Pembelian
52	1	3	2	05	03	01	008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	000025	Pembelian
53	1	3	2	05	03	02	014	Lain-lain (Meja Rapat Pejabat)	000001		Pembelian
54	1	3	2	05	03	03	005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001	000007	Pembelian
55	1	3	2	05	03	03	006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	000054	Pembelian
56	1	3	2	05	03	03	008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001	000021	Pembelian
57	1	3	2	05	03	06	013	Lain-lain (Kursi Tamu Ruangan Pejabat)	000001	000002	Pembelian
58	1	3	2	05	03	07	007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001	000016	Pembelian
59	1	3	2	06	01	01	048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000001	000010	Hibah
60	1	3	2	06	01	02	042	Rak Peralatan	000001		Pembelian
61	1	3	2	06	01	02	105	Layar Film/Projector	000001	000011	Pembelian
62	1	3	2	06	01	02	149	Splitter	000001	000010	Hibah
63	1	3	2	06	02	01	003	Pesawat Telephone	000001		Pembelian
64	1	3	2	08	01	56	139	Alat Laboratorium Lainnya Lain-Lain	000003		Pembelian
65	1	3	2	10	01	02	001	P.C Unit	000001	000052	Pembelian
66	1	3	2	10	01	02	002	Lap Top	000001	000027	Pembelian
67	1	3	2	10	01	02	003	Note Book	000001	000014	Pembelian
68	1	3	2	10	02	03	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	000029	Pembelian
69	1	3	2	10	02	03	004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	000005	Pembelian
70	1	3	2	10	02	03	017	External/ Portable Hardisk	000001	000006	Pembelian
71	1	3	2	10	02	04	004	Modem	000001	000012	Hibah
72	1	3	2	19	01	02	009	Keranjang Bola/Ring	000001		Pembelian

Sumber: KIB A, KIB B dan KIB C Laporan Bendahara Barang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Kubu Raya (2025)

Penjelasan Tabel 1.9. sebagai berikut:

1. Aset tetap tanah terletak di Desa Sugai Radak Satu, Kecamatan Terentang dan Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu (terlampir pada Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah).
2. Aset tetap gedung dan bangunan terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Batu Ampar, Kuala Mandor B, Kubu, Rasau Jaya, Terentang, Sungai Ambawang, Sungai Raya dan Teluk Pakedai (terlampir pada Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan).

### **B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Permasalahan Pembangunan periode 2025-2026 pada dasarnya merupakan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan kedepan. *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu (1) Ketahanan Pangan memiliki skor yang paling tinggi, disusul dengan (2) Kesejahteraan Petani, (3) Produktivitas Pertanian, (4) Penanggulangan Bencana Pertanian, dan (5) Hilirisasi Pertanian. dari isu tersebut diambil dua isu strategis utama yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Isu strategis yang pertama adalah Ketahanan Pangan. Pada aspek ketahanan pangan terdapat unsur-unsur penting yang perlu di jadikan permasalahan utama diantaranya adalah Ketersediaan pangan, Cadangan pangan, keamanan pangan konsumsi pangan Masyarakat. Unsur-unsur tersebut sangat memenuhi unsur urgensi, keseriusan serta potensi penambahan masalah apabila tidak dijadikan isu utama.

Isu strategis yang kedua adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Sasaran dari peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani, meskipun peningkatan pendapatan petani tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan karena tergantung pula dari tingkat pengeluaran dan faktor-faktor non finansial (sosial). Namun pendapatan petani merupakan indikator yang secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, sehingga indikator dari sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan rumah tangga petani.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2026 perlu dilakukan perubahan setelah terbitnya dua surat edaran sebagai berikut. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang utuh. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026.

Renstra pada periode ini merupakan Renstra transisi yang disusun sebelum penetapan visi dan misi Bupati terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk RKPD dan Renstra Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya mengelola tiga urusan yaitu urusan penunjang, urusan ketahanan pangan dan urusan pertanian. Tujuan dan sasaran ketiga urusan tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun				
						2025	2026			
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP					B (63,30)	B (63,89)	
			S.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.1	Nilai SAKIP SKPD	Poin		B (66,00)	B (67,00)
T.2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	IT.2	Pertumbuhan PDRB				Persen	4,98	5,00	5,50
			S.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	IS.2	PDRB SubSektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rupiah		580.000.000	590.000.000
			S.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	IS.3	Skor PPH	Poin	72,67	74,00	82,27

Sumber: Renstra DKPP 2025-2026

## 1. Visi

Visi Renstra mengacu kepada visi RPJMD. Melaju yang dimaksudkan adalah Melayani dan Maju, yang mengandung makna sebagai berikut :

- a. *Melayani* bermakna suatu komitmen dan upaya yang dilakukan untuk menyediakan, menyiapkan dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima dan pelayanan sosial dasar yang, merata, berkualitas, humanis dan religius, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan digitalisasi.

b. *Maju* bermakna suatu kondisi Kabupaten Kubu Raya yang lebih baik dari sebelumnya, bergerak ke depan dan telah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta meningkatnya pembangunan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya, serta pemberdayaan masyarakat yang unggul dan modern.

## 2. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi “TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU”, maka perlu dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, efektif, efisien, akuntabel dan digitalisasi.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang layak, merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta pemberdayaan masyarakat madani, humanis dan religius.

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan isu strategis yang dihasilkan menggunakan analisis pohon masalah maka tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya 2025-2026 dirumuskan melalui pencapaian 2 (dua) tujuan strategis sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Tujuan dan Indikatornya

Tujuan		Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun	
					2025	2026
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP	B (62,13)	B (63,30)	B (63,89)
T.2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	IT.2	Pertumbuhan PDRB	4,98	5,00	5,50

Sumber: Pohon Kinerja DKPP dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2025-2026

## B. Perjanjian Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Perjanjian kinerja eselon II mengacu pada sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2026 ada 3 (tiga) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Target Kinerja Eselon II

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun			
				2025	2026		
S.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.1	Nilai SAKIP SKPD	Poin	66,65	B (66,00)	B (67,00)
S.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	IS.2	PDRB SubSektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rupiah	585.750.000	580.000.000	590.000.000
S.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	IS.3	Skor PPH	Poin	72,67	74,00	82,27

Sumber: Pohon Kinerja DKPP Tahun 2025-2026

### 2. Perjanjian Kinerja Eselon III

Perjanjian kinerja eselon III mengacu pada indikator Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Terdapat program diampu secara tunggal oleh Eselon III dan terdapat juga program yang diampu secara bersama-sama oleh Eselon III. Indikator kinerja eselon III secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Target Kinerja Eselon III

No	Program	Indikator	Target	Pagu Indikasi (Renstra)	Pagu Definitif (APBD)	Sumber Dana	Penanggungjawab
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	63,30	15.982.250.000	15.168.298.391	DAU	Bidang Ketahanan Pangan
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	3,0	1.335.997.440	859.182.391	DAU,	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Daya Dukung Prasarana Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian (%)	100	1.235.191.450	1.076.699.072	DAU	Bidang Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan Pertanian (%)	70	464.000.000	551.936.971	DAU	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Penyuluhan
5	Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	100	867.000.000	1.104.821.472	DAU, DAK Non Fisik	Bidang Penyuluhan
6	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Gudang Cadangan Pangan (Unit)	1	1.000.000.000	76.758.744	DAU	Bidang Ketahanan Pangan
7	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	79,04	1.000.000.000	140.852.481	DAU	Bidang Ketahanan Pangan
8	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,00	1.100.000.000	433.672.860	DAU	Bidang Ketahanan Pangan
9	Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan	100	200.000.000	35.828.606	DAU	Bidang Ketahanan Pangan

		Keamanan Pangan (%)					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra DKPP 2025-2026 dan APBD (P) Kab Kubu Raya TA 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ada ketidaksesuaian antara pagu dalam Renstra dan pagu dalam APBD. Beberapa program dianggarkan dalam APBD melebihi pagu renstra dan sebagian program dianggarkan kurang dari pagu Renstra dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan melebihi pagu Renstra sebesar 105,09%.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dianggarkan sebesar 64,31% dalam APBD 2025.
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dianggarkan sebesar 87,17% dalam APBD 2025.
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dianggarkan melebihi pagu Renstra sebesar 118,95%.
5. Program Penyuluhan Pertanian dianggarkan melebihi pagu Renstra sebesar 127,43%.
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dianggarkan sebesar 7,68% dalam APBD 2025.
7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dianggarkan sebesar 14,09% dalam APBD 2025.
8. Program Penanganan Kerawanan Pangan dianggarkan sebesar 39,42% dalam APBD 2025.
9. Program Pengawasan Keamanan Pangan dianggarkan sebesar 17,91% dalam APBD 2025.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Kriteria penilaian indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Skala peringkat nilai kinerja seperti tercantum dalam tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Makna Gradasi Nilai
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3	66% ≤ 75%	Sedang	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 55%	Sangat Rendah	

			dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
--	--	--	---

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 (Tabel T.E.1 Lampiran Hal 495)

Pengukuran kinerja mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Formulasi pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya diukur dengan menghitung tingkat capaian tiga sasaran strategis yang masing-masing terdiri dari satu indikator kinerja utama (IKU). IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya ada tiga yaitu Nilai SAKIP SKPD (Poin), PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Rupiah), dan Skor Pola Pangan Harapan (Poin).

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dengan indikator kinerja utama nilai SAKIP SKPD dengan target 66,00 tercapai 70,30 (persentase capaian sebesar 106,52%). Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator kinerja utama PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target 580.000.000 tercapai sebesar 615.330.000 (persentase capaian sebesar 106,09%). Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Kubu Raya dengan target 74,00 tercapai sebesar 79,00 (persentase capaian sebesar 106,76%).

### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Sasaran Strategis	Realisasi	%
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.1	Nilai SAKIP SKPD	Poin	B (66,00)	69,40	105,15
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	IS.2	PDRB Sub Sektor Tanaman	Rupiah	580.000.000	615.330.000	106,09

			Pangan dan Hortikultura				
3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	IS.3	Skor PPH	Poin	74,00	79,00	106,79

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya (2025), LHE Inspektorat Kab Kubu Raya (2024) dan Laporan Analisa Pola Pangan Harapan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.

Berdasarkan dokumen rencana strategis SKPD 2025-2026, indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya terdiri dari tiga yaitu:

1. Nilai SAKIP SKPD adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan penunjang pemerintahan.
2. PDRB sektor pertanian adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan urusan bidang pertanian.
3. Skor Pola Pangan Harapan adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan bidang pangan.

Perhitungan indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

#### 1.1. Nilai SAKIP SKPD

Perhitungan Nilai SAKIP SKPD didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, Nomor: 700.1.2.1 / 42 / Inspt-A, tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir. SAKIP SKPD Tahun 2024 belum dilakukan reviu dan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKU Pertama} &= \frac{\text{Nilai LAKIP Tahun ini}}{\text{Nilai LAKIP Target Tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{70,30}{69,00} \times 100\% \\
 &= 106,52\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Nilai SAKIP SKPD Tahun 2025 sebesar 106,52%.

### 1.2. PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sehubungan dengan belum terbitnya data PDRB Tahun 2025 maka data yang digunakan mengacu pada data tahun 2024 mengacu pada Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. Data yang dihitung sebagai berikut.

Tabel 3.3. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2025

No	Sub Sektor	Nilai (Rupiah)
1	Tanaman Pangan	387.070.000
2	Tanaman Hortikultura	228.260.000
	Jumlah Tahun 2025	615.330.000
	Target Tahun 2025	580.000.000

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya (2025)

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKU Kedua} &= \frac{\text{PDRB Tahun ini}}{\text{PDRB Target Tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{615.330.000}{580.000.000} \times 100\% \\
 &= 106,09 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nilai capaian IKU PDRB Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 sebesar 106,09%. Sebagai data pendukung perhitungan maka dilampirkan dokumen BPS sebagaimana terlampir.

### 1.3. Nilai Skor Pola Pangan Harapan

Perhitungan Nilai Skor Pola Pangan Harapan didasarkan pada Laporan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang

dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebagaimana berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKU Ketiga} &= \frac{\text{Skor PPH Tahun ini}}{\text{Skor PPH Target Tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{79,00}{74,00} \times 100\% \\
 &= 106,76\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Nilai capaian Skor PPH Tahun 2025 sebesar 106,76 %.

Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Manfaat analisis efisiensi penggunaan sumber daya sangat signifikan, meliputi penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas (output lebih banyak dengan input sama), pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data, serta optimalisasi teknologi. Analisis ini membantu mengurangi pemborosan, memaksimalkan potensi sumber daya (manusia, material, energi), dan mencapai hasil maksimal dengan cara paling ekonomis, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP (Poin)	85,00	63,63	74,86	14.055.702.225	13.895.960.530	98,86	-24,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Desa Dengan Ketahanan dan Kerentanan Pangan Prioritas 1 (Desa)	7,00	6,00	85,71	13.971.164	13.965.119	99,96	-14,25

3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indek Komposit Ketahanan Pangan (Poin)	54,00	54,88	101,63	613.397.532	585.807.201	95,5	6,13
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)	80,00	72,30	90,38	207.095.535	199.016.308	96,1	-5,72
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Unit Usaha Tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	121.109.914	120.213.332	99,26	0,74
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)	100,00	100,00	100,00	2.628.575.672	2.584.035.050	98,31	1,69
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	3,00	3,04	101,33	4.903.665.640	4.887.084.728	99,66	1,67
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Tertangani (100%)	100,00	100,00	100,00	410.766.555	389.345.371	94,79	5,21
9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Perlindungan Pertanian (%)	100,00	100,00	100,00	1.014.944.876	894.685.968	88,15	11,85
10	Program Penyuluhan Pertanian	Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani (%)	100,00	100,00	100,00	1.988.425.835	1.809.990.429	91,03	8,97
	Jumlah				95,39	25.957.654.948	25.380.104.036	97,78	-2,39

Sumber: LRA DKPP Kabupaten Kubu Raya (2025)

#### b. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2025 menjalankan 9 (sembilan) program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 8 (delapan) program utama. Setiap program yang dijalankan memiliki permasalahan tersendiri sehingga perlu disampaikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan dan solusi pada setiap program yang dijalankan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

No	Program	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum maksimal. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah belum dijalankan secara maksimal.	Memaksimalkan fungsi dan peran SAKIP.
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1. Intensifikasi pertanian belum berjalan secara maksimal. 2. Pemeliharaan kelestarian sumber daya lahan dan keberlanjutan produksi jangka panjang terabaikan	1. Memaksimalkan intensifikasi pertanian 2. Memaksimalkan pemeliharaan kelestarian sumber daya lahan
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sasaran program diversifikasi pangan yaitu menurunkan ketergantungan konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat lainnya belum dijalankan secara maksimal	Memaksimalkan sasaran program diversifikasi pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Sinkronisasi dan koordinasi lintas stakeholder dalam penanganan kerawanan pangan belum berjalan maksimal	Memaksimalkan sinkronisasi dan koordinasi lintas stakeholder
5	Program Pengawasan	Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang undang-undang No 7, tahun 1996, Undang-undang No 08, 1999 tentang	Memaksimalkan peran stakeholder yang terkait

	Keamanan Pangan	perlindungan konsumen serta Undang-undang kesehatan No 23 tahun 1992 tentang kesehatan belum dijalankan secara maksimal.	dengan Undang-Undang tersebut.
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan distribusi benih, pupuk, pestisida, kurang maksimal	Memaksimalkan fungsi pengawasan
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mekanisasi pertanian terkendala kontur tanah berawa sehingga menghambat mobilisasi alat berat seperti transplanter, combine harvester, pompa air besar, dan traktor roda empat.	Diperlukan peralatan mekanisasi hasil modifikasi sehingga mobilitasnya cukup lincah dan handal.
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kejadian El Nino biasanya diikuti dengan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara, sedangkan kejadian La Nina merangsang kenaikan curah hujan di atas curah hujan normal. Kedua anomali iklim tersebut tidak menguntungkan bagi produksi pertanian, karena penurunan drastis curah hujan akibat El Nino dapat menimbulkan kegagalan panen akibat kekeringan	Meminimalisir dampak El Nino dan La Nina.
9	Program Penyuluhan Pertanian	Sistem penyuluhan belum berjalan dengan baik karena 80% permasalahan yang dihadapi petani berasal dari luar petani.	Memaksimalkan pasar, teknologi, input, intensitas produksi dan transportasi desa mencapai keadaan maksimum

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dapat dikaji dari tiga aspek seperti yang tertuang dalam indikator kinerja utama.

### 2.1. PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 3.6. Capaian Kinerja PDRB

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024	2025
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.966,90	3.000,07	3.044,90	3.151,60
<b>1</b>	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.609,64	2.641,27	2.680,74	2.774,68
<b>1.a.</b>	Tanaman Pangan	371,71	368,46	373,96	387,07
<b>1.b.</b>	Tanaman Hortikultura	217,66	217,29	220,54	228,26
<b>1.c.</b>	Tanaman Perkebunan	1.346,33	1.380,82	1.401,46	1.450,57
<b>1.d.</b>	Peternakan	605,52	605,81	614,86	636,41
<b>1.e.</b>	Jasa Pertanian dan Perburuan	68,42	68,89	69,92	72,37
<b>2</b>	Kehutanan dan Penebangan Kayu	147,59	147,94	150,15	155,41
<b>3</b>	Perikanan	209,67	210,86	214,01	221,51
	Kabupaten	18.754,97	19.783,11	20.768,22	21.794,06

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya (2022 s/d 2025)

Penjelasan:

Nilai PDRB sektor pertanian meningkat setiap tahun tetapi secara agregat kontribusinya semakin menurun. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Indikasi perubahan struktur ekonomi dapat dilihat dengan pergeseran peranan atau perubahan sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap produk domestik bruto yang semakin berkurang diikuti dengan pergeseran peranan sektor sekunder (industri, listrik gas air, dan konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan dan jasa) yang cenderung meningkat.

## 2.2. Nilai Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator mutu gizi yang mengukur seberapa baik pola makan penduduk memenuhi kriteria beragam, seimbang, dan cukup gizi, di mana skor tertinggi 100 berarti konsumsi pangan ideal, mencerminkan kualitas gizi masyarakat, dan menjadi acuan perencanaan pangan. Semakin tinggi skor PPH, semakin baik kualitas gizi dan semakin beragam/seimbang pola konsumsinya, menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi dan merencanakan ketersediaan serta konsumsi pangan di suatu wilayah.

Kinerja pencapaian skor pola pangan harapan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2023 sampai dengan 2025. Hal ini berarti bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kubu Raya semakin membaik.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Skor PPH

No	Kelompok Pangan	Skor PPH 2023	Skor PPH 2024	Skor PPH 2025
1	Padi-padian	24,5	24,5	24,6
2	Umbi-umbian	0,8	1,0	1,2
3	Pangan Hewani	18,9	19,5	20,1
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0
5	Buah / Bijian Berminyak	0,4	0,5	0,5
6	Kacang-Kacangan	3,7	4,4	5,2
7	Gula	2,1	2,2	2,2
8	Sayur dan Buah	17,2	18,7	20,2
9	Lain-lain	-	-	-
	Total	72,6	75,8	79,0

Sumber: Laporan Analisa Skor PPH Kab Kubu Raya 2023-2025

Penjelasan.

Capaian Skor PPH sangat merupakan kinerja OPD yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan. OPD yang menangani urusan tersebut di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ada 3 OPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

### 2.3. Nilai SAKIP SKPD

Tabel 3.8. Capaian Kinerja SAKIP

No	Lapangan Usaha	Bobot	2022	2023	2024
A	Perencanaan Kinerja	30		20,70	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30		21,00	19,20
C	Pelaporan Kinerja	15		8,70	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25		16,25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,00	66,65	69,40

Sumber: LHE Inspektorat Tahun 2022-2024

Penjelasan.

Nilai SAKIP SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan sebesar 2,75 poin pada tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat bergantung pada evaluator, meskipun ada acuan standar seperti PermenPANRB No. 88/2021 dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Ketergantungan ini muncul karena evaluator (APIP, KemenPANRB, atau BPK) menggunakan subjektivitas dalam interpretasi data, teknik evaluasi yang bervariasi (observasi, wawancara, studi dokumen), dan tingkat kedalaman analisis berdasarkan pemahaman evaluator terhadap kompleksitas implementasi SAKIP instansi yang dievaluasi.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk lebih memperjelas perbandingan antara capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dengan target jangka menengah seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD maka diuraikan menjadi tiga bagian sebagai berikut.

#### 3.1. Kinerja Pencapaian Nilai SAKIP

Tabel 3.9. Target Kinerja SAKIP Sampai Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Kabupaten (RPJMD)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	B (62,63)	B (65,00)

	Kinerja dan Keuangan						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD (Renstra)	63,63	67,00	66,65	69,40	66,00

Sumber: RPJMD Kab Kubu Raya 2019-2025

Penjelasan:

Secara umum antara realisasi dan target tidak terdapat selisih yang signifikan, hal ini mengindikasikan perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Data yang IKU sangat penting sebagai dasar melaksanakan monitoring dan evaluasi. Menurut PP 39/2006, monitoring merupakan kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja program. Sedangkan evaluasi menurut PP 39/2006 adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

### 3.2. Kinerja Pencapaian PDRB

Tabel 3.10. Target Kinerja PDRB Sampai Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Perumbuhan Ekonomi (RPJMD)	4,28	4,99	6,07	4,99	6,048
2	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sub Sektor TP dan Hortikultura	-	589,37	585,75	594,50	615,33

Sumber: RPJMD dan Renstra 2025-2026

### 2.3. Kinerja Penganggaran

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner hanya dijalankan pada Tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdampak pada pemindahan program tersebut ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2022.

Tabel 3.11. Target Kinerja Penganggaran OPD

No	Program	2021		2022	
		RPJMD	Realisasi	RPJMD	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.904.347.184	14.055.702.225	17.139.999.263	13.760.062.827
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.319.380.738	2.628.575.672	2.552.287.849	1.932.457.906
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.404.941.267	9.191.755.620	5.065.682.457	2.471.366.870
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.024.560.876	1.014.944.876	1.178.245.007	656.848.570
5	Penyuluhan Pertanian	1.046.505.079	1.988.425.835	1.203.480.841	3.938.393.514
6	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	13.971.164	13.971.164	16.066.839	3.000.000.000
7	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	613.479.668	613.397.532	705.501.618	429.366.466
8	Penanganan Kerawanan Pangan	207.095.535	207.095.535	238.159.865	84.698.410
9	Pengawasan Keamanan Pangan	121.109.914	121.109.914	139.276.401	14.999.961
10	Prog Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	410.872.805	410.766.555	0	0
	Jumlah	25.066.264.230	30.245.744.928	28.238.700.140	26.288.194.524

Berlanjut ke tabel berikut

Lanjutan Tabel 3.11.

No	2023		2024		2025	
	RPJMD	Realisasi	RPJMD	Realisasi	RPJMD	Realisasi
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	19.710.999.152	13.088.877.659	22.667.649.024	14.697.624.650	15.982.250.000	15.168.298.391
2	2.935.131.026	1.449.936.082	3.375.400.680	1.169.605.946	1.335.997.440	859.182.391

3	5.825.534.826	4.602.611.029	6.699.365.049	6.975.615.054	1.235.191.450	1.076.699.072
4	1.354.981.758	1.039.995.632	1.558.229.022	332.987.035	464.000.000	551.936.971
5	1.384.002.967	944.917.082	1.591.603.412	535.330.338	867.000.000	1.104.821.472
6	18.476.864	51.851.543	21.248.394	37.488.838	1.000.000.000	76.758.744
7	811.326.862	554.516.078	933.025.891	89.608.733	1.000.000.000	140.852.481
8	273.883.845	170.159.974	314.966.422	228.853.982	1.100.000.000	433.672.860
9	160.167.861	32.928.560	184.193.040	55.533.452	200.000.000	35.828.606
10	0	0	0	0	0	0
	32.474.505.161	21.935.793.639	37.345.680.934	24.122.648.028	22.084.438.890	19.448.050.988

Sumber: RPJMD dan APBDP 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

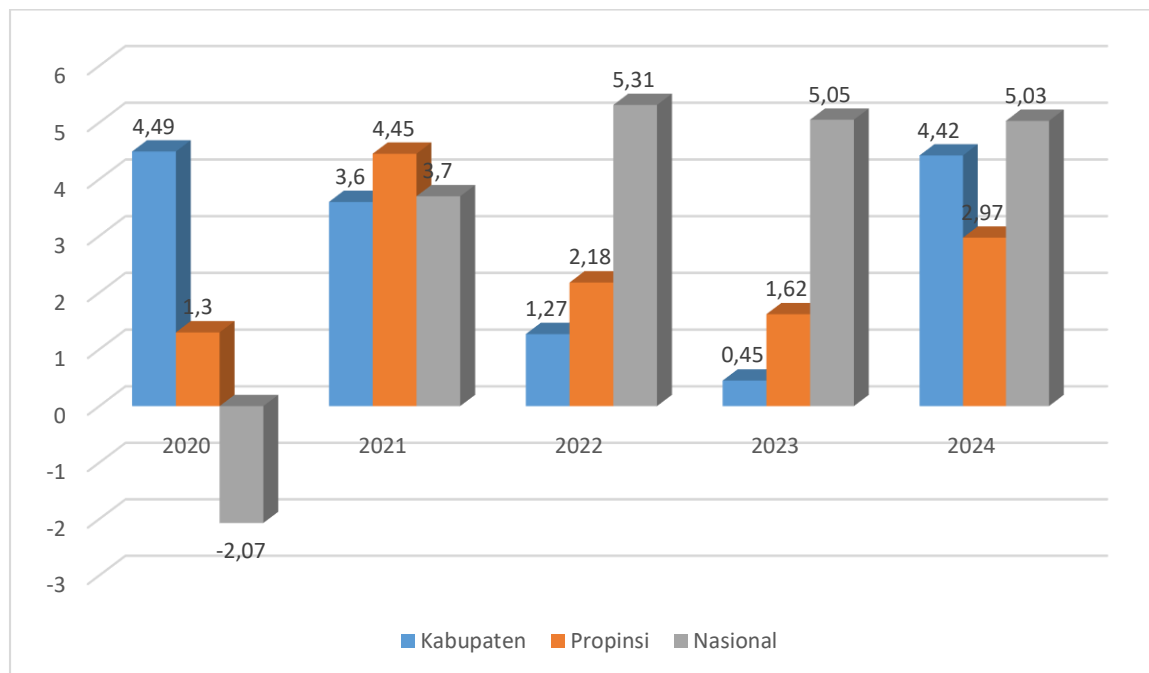
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kubu Raya (Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) mengalami kenaikan positif setiap tahun kecuali di tahun 2020. Pertumbuhan PDRB tingkat Kabupaten melebihi pertumbuhan PDRB tingkat provinsi tetapi masih di bawah pertumbuhan PDB tingkat nasional.

Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan PDRB

No		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	4,49	3,6	1,27	0,45	4,42
2	Propinsi	1,3	4,45	2,18	1,62	2,97
3	Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Kabupaten, BPS Provinsi Kalbar dan BPS RI (2025)

Gambar 3.1. Diagram Bar PDRB 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten, BPS Propinsi Kalbar dan BPS RI (2025)

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

### 5.1. Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Keberhasilan peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan dipengaruhi oleh empat faktor penting antara lain pengawasan/ monitoring, komitmen pimpinan instansi, sumber daya manusia dan koordinasi antar bidang pada SKPD.

#### 5.1.1. Pengawasan/monitoring

Lemahnya fungsi pengawasan/monitoring pada implementasi SAKIP di Kota Palembang dengan tidak dilakukannya reuiv LAKIP SKPD mengakibatkan LAKIP SKPD yang belum mengimplementasikan kriteria-kriteria sesuai pedoman LAN tidak dapat terdeteksi. Padahal LAKIP harus memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada pedoman yang sudah ditetapkan.

#### 5.1.2. Komitmen pimpinan instansi

Dukungan komitmen dari pimpinan instansi akan sangat membantu dalam menyusun LAKIP SKPD yang berkualitas secara substansi. Selain itu komitmen pimpinan instansi terhadap LAKIP dengan melaporkan keberhasilan/kegagalan setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan pada LAKIP SKPD akan menghasilkan

suatu laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dapat dipercaya dan berkualitas secara substansi.

#### 5.1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting pada proses penyusunan LAKIP SKPD, dengan jumlah personil yang memadai dan memiliki kompetensi yang baik tentunya akan menunjang pada penyusunan LAKIP sehingga dapat tercapai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 5.1.4 Koordinasi antar bidang pada SKPD

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tanggung jawab setiap SKPD sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga pada proses proses penyusunannya sangat memerlukan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam suatu SKPD, hal ini akan sangat menunjang pada kualitas dan ketepatan waktu pelaporan LAKIP baik itu LAKIP SKPD maupun LAKIP Pemerintah Daerah, sehingga dengan telah mengimplementasikan setiap kriteria pada pedoman LAN dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 5.2. Kesejahteraan Petani

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Kubu Raya dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting seperti yang diuraikan sebagai berikut.

#### 5.2.1. Alih Fungsi Lahan

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.

### 5.2.2. Produktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Kubu Raya khususnya padi masih sangat rendah. Produktivitas padi rata-rata 3,4 ton per hektar padahal di Pulau Jawa dapat mencapai 6 ton per hektar (hanya 50% dari produktivitas di Pulau Jawa).

### 5.2.3. Kelembagaan Penyuluh

Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal.

### 5.3. Ketahanan Pangan Kubu Raya

Keberhasilan peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Kubu Raya dipengaruhi oleh faktor utama dan faktor pendukung (ketersediaan dan akses pangan).

#### 5.3.1. Faktor-faktor Utama

- a. Pendapatan: Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan daya beli, memungkinkan masyarakat membeli pangan lebih beragam dan bergizi, sehingga skor PPH meningkat.
- b. Pendidikan: Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan pengetahuan gizi yang lebih baik, mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.
- c. Jumlah Keluarga: Semakin besar jumlah keluarga, semakin kompleks kebutuhan pangan, tetapi juga bisa berdampak positif pada PPH jika pendapatan memadai.
- d. Harga Pangan: Harga yang terjangkau mempermudah akses ke pangan beragam; harga tinggi cenderung membuat masyarakat memilih pangan murah (karbohidrat).
- e. Ketersediaan Pangan: Ketersediaan beragam jenis pangan secara stabil di pasaran (produksi, stok, impor) sangat penting untuk memenuhi PPH.

#### 5.3.2. Faktor Ketersediaan dan Akses Pangan

- a. Produksi Pangan: Produksi lokal yang melimpah mendukung ketersediaan.
- b. Infrastruktur dan Geografis: Kondisi geografis dan infrastruktur transportasi memengaruhi distribusi dan aksesibilitas pangan.

- c. Stabilitas Pangan: Ketersediaan yang stabil tanpa fluktuasi musiman atau tahunan.
- d. Kebijakan Pangan: Kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan sangat memengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan.

#### 5.4. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah pembangunan pertanian berbasis kawasan. Pembangunan pertanian pada intinya harus merupakan penjabaran dari visi pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional, yaitu: (1) berlandaskan pada azas ekonomis, efisien, efektif dan transparan; (2) berbasis kinerja yang berorientasi *outcome*; (3) berhorizon pengeluaran jangka menengah; (4) berdimensi wilayah; (5) dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah; (6) dirancang dengan mengakomodasi pendekatan politik, *top down policy* dan *bottom-up planning*; dan (7) disusun secara teknokratis dan berbasis pada penataan ruang. Berdasarkan visi tersebut, pengembangan komoditas pertanian dengan basis wilayah atau kawasan sangat diperlukan mengingat berbagai pertimbangan seperti uraian berikut.

1. Pertama pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan ketetapan tata ruang dan wilayah yang mengarahkan dimana lokasi kawasan budidaya, termasuk kawasan budidaya untuk pengembangan komoditas pertanian.
2. Kedua perencanaan, model pengembangan dan strategi pengembangan kawasan pertanian memiliki arah dan tujuan tertentu sehingga maksimalisasi faktor-faktor internal dan eksternalnya didalam kawasan pertanian dapat menciptakan nilai tambah maupun dampak pengganda untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan kerja maupun kesejahteraan rakyat.
3. Ketiga keterbatasan anggaran pembangunan menyebabkan pemerintah pusat dan daerah perlu memilih usaha pertanian mulai dari hulu hingga hilir yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Penetapan prioritas tersebut perlu dilakukan agar kegiatan pembangunan pertanian dapat lebih fokus yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan.
4. Keempat, pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya berbasis pada faktor-faktor sumber daya. Faktor sumber daya dapat meliputi kekayaan alam, tenaga kerja, lokasi strategis untuk pengembangan komoditas tertentu, penguasaan modal, teknologi. Apabila pengembangan

kawasan pertanian dilakukan dengan berlandaskan pada keunggulan faktor-faktor tersebut, maka kemampuan untuk memiliki daya saing

5. Kelima setiap kawasan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan banyak alternatif komoditas. Agar pengembangan komoditas pertanian dapat lebih fokus maka diperlukan penentuan komoditas prioritas yang merupakan pilihan para *stakeholder*.
6. Keenam setiap wilayah atau kawasan memiliki karakteristik tertentu yang sesuai atau tidak sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian tertentu. Oleh karena itu pengembangan komoditas pertanian perlu difokuskan pada kawasan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Kesesuaian karakteristik wilayah dan komoditas tersebut tidak hanya dipandang dari segi agroekosistem yang memungkinkan pertumbuhan tanaman pertanian secara optimal tetapi harus mempertimbangkan aspek lainnya seperti ketersediaan infrastruktur pendukung, ketersediaan teknologi hulu hingga hilir, skala penguasaan lahan, skala potensi wilayah, dan aspek lainnya yang relevan dengan komoditas yang dikembangkan.
7. Ketujuh pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang memiliki orientasi jangka panjang. Oleh karena itu pengembangan komoditas pertanian di setiap wilayah atau kawasan seyogyanya dilandasi dengan visi dan misi yang jelas yang selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.
8. Kedelapan setiap kawasan memiliki siklus pertumbuhan, mulai dari kawasan embrio hingga kawasan yang telah berkembang. Setiap siklus memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan pengembangan kawasan pertanian perlu dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Terkait dengan tahap perkembangan kawasan secara umum terdapat tiga tahapan perkembangan kawasan yaitu (Wirabrata, 2000; Setiyanto, 2004): (1) Fase start-up, (2) Fase pilot dan (3) Fase difusi.
9. Kesembilan dalam rangka efisiensi kegiatan pembangunan pengembangan kawasan pertanian perlu disinergikan dengan pengembangan berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh kementerian lain dan bersifat saling melengkapi. Misalnya, pengembangan kawasan hortikultura dapat disinergikan dengan pengembangan kawasan pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata. Begitu pula pengembangan kawasan jagung dapat

disinerjikan dengan pengembangan kawasan sapi potong dan pengembangan industri pakan ternak atau industri agro lainnya yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian.

10. Kesepuluh, pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dan interaksi antar wilayah dalam kerangka pengembangan perekonomian. Kawasan komoditas unggulan memiliki sistem rantai distribusi dan pemasaran yang cenderung panjang dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi, dari wilayah sumber input ke lokasi kawasan. Sistem ini menyangkut distribusi logistik atau angkutan barang dan proses penanganan komoditas yang membutuhkan waktu yang lama. Keterkaitan dan interaksi antar wilayah dalam pengembangan kawasan dihadapkan pada kondisi infrastruktur transportasi (jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain), listrik dan telekomunikasi (jaringan telepon dan internet) ketersediaannya dan lain-lain sangat diperlukan dalam kondisi baik dan merata. Daerah penghasil bahan baku memasarkan komoditas unggulan maupun produk-produk hasil olahan terkait ke daerah-daerah yang melalui proses transformasi dan konversi mampu memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif secara lebih baik. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan yang jelas bahwa perubahan struktural pada masyarakat sekitar kawasan sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peranan kota dan daerah lain sebagai penyedia jasa dan tenaga kerja, pasokan produksi, pasar, industri manufaktur, maupun informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut (Setiyanto, 2011a). Pengembangan kawasan akan memberikan hasil perbaikan perekonomian yang optimal apabila terdapat kesesuaian dalam proses interaksi yang efektif antar kota (pusat konsumsi) dan pedesaan yaitu kawasan komoditas unggulan atau pusat produksi

## B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana	Jumlah Realisasi	Persentase
1	5	BELANJA DAERAH	19.448.050.988	DAU	18.588.072.195	95,58
2	5,1	BELANJA OPERASI	19.316.006.627	DAU	18.462.841.479	95,58
3	5.1.01	Belanja Pegawai	13.748.519.761	DAU	13.157.147.795	95,70
4	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.507.486.866	DAU	5.245.693.684	95,25
5	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000	DAU	60.000.000	100,00
6	5,2	BELANJA MODAL	132.044.361	DAU	125.230.716	94,84
7	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.044.361	DAU	125.230.716	94,84

8	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.168.298.391	DAU	14.450.900.949	95,27
9	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.725.158	DAU	66.434.418	92,62
10	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.031.379	DAU	20.461.378	88,84
11	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.973.240	DAU	5.865.360	98,19
12	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.720.539	DAU	40.107.680	93,88
13	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.825.619.274	DAU	13.210.082.435	95,55
14	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.810.572.169	DAU	13.196.342.979	95,55
15	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.047.105	DAU	13.739.456	91,31
16	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.860.210	DAU	5.770.739	38,83
17	2.09.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.860.210	DAU	5.770.739	38,83
18	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.336.300	DAU	134.144.650	89,83
19	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.942.495	DAU	76.942.495	100,00
20	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.999.045	DAU	8.691.516	86,92
21	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.617.000	DAU	12.484.000	70,86
22	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.396.415	DAU	6.309.753	75,15
23	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.381.345	DAU	29.716.886	81,68
24	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.488.482	DAU	94.839.735	87,42
25	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.512.692	DAU	5.512.692	100,00
26	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.139.175	DAU	11.147.942	91,83
27	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.045.776	DAU	2.941.200	96,57
28	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.553.850	DAU	3.135.750	88,24
29	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.315.018	DAU	64.182.452	84,10
30	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.921.971	DAU	7.919.699	99,97
31	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.172.899	DAU	9.859.999	96,92
32	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.172.899	DAU	9.859.999	96,92
33	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.976.451	DAU	731.211.566	94,60
34	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.709.960	DAU	93.123.548	79,79
35	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.266.491	DAU	638.088.018	97,23
36	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.119.617	DAU	198.557.407	92,30
37	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.994.158	DAU	32.183.800	80,47
38	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	61.877.459	DAU	54.106.108	87,44

		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
39	2.09.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.418.000	DAU	12.417.499	100,00
40	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.830.000	DAU	99.850.000	99,03
41	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	76.758.744	DAU	61.759.272	80,46
42	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.758.744	DAU	61.759.272	80,46
43	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76.758.744	DAU	61.759.272	80,46
44	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	140.852.481	DAU	136.323.188	96,78
45	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	66.344.156	DAU	62.017.005	93,48
46	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	43.565.026	DAU	43.529.508	99,92
47	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	5.416.592	DAU	5.375.581	99,24
48	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	11.651.617	DAU	9.218.816	79,12
49	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.710.921	DAU	3.893.100	68,17
50	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	74.508.325	DAU	74.306.183	99,73
51	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4.867.300	DAU	4.866.640	99,99
52	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69.641.025	DAU	69.439.543	99,71
53	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	433.672.860	DAU	401.309.762	92,54
54	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.520.342	DAU	8.767.805	76,11
55	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.520.342	DAU	8.767.805	76,11
56	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	422.152.518	DAU	392.541.957	92,99
57	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.118.362	DAU	245.060.998	89,40
58	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	143.373.185	DAU	142.915.000	99,68
59	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4.660.971	DAU	4.565.959	97,96
60	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.828.606	DAU	30.469.306	85,04
61	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.828.606	DAU	30.469.306	85,04

62	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.828.606	DAU	30.469.306	85,04
63	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	859.182.391	DAU	840.053.849	97,77
64	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	251.836.004	DAU	237.791.149	94,42
65	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.736.293	DAU	16.538.100	69,67
66	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	204.392.618	DAU	197.935.949	96,84
67	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	23.707.093	DAU	23.317.100	98,35
68	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	607.346.387	DAU	602.262.700	99,16
69	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	315.193.912	DAU	310.383.500	98,47
70	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	DAU	0	0,00
71	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	292.152.475	DAU	291.879.200	99,91
72	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.076.699.072	DAU	1.056.949.768	98,17
73	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	64.909.236	DAU	63.486.354	97,81
74	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	64.909.236	DAU	63.486.354	97,81
75	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.011.789.836	DAU	993.463.414	98,19
76	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	634.460.973	DAU	624.902.549	98,49
77	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0	DAU	0	0,00
78	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	186.228.754	DAU	182.337.135	97,91
79	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	191.100.109	DAU	186.223.730	97,45
80	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	551.936.971	DAU	534.254.113	96,80
81	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	551.936.971	DAU	534.254.113	96,80
82	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	472.949.205	DAU	455.802.753	96,37
83	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	78.987.766	DAU	78.451.360	99,32
84	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.104.821.472	DAU	1.076.051.988	97,40
85	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.104.821.472	DAU	1.076.051.988	97,40
86	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	460.395.620	DAU	459.700.800	99,85
87	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	43.461.503	DAU	41.936.080	96,49
88	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	21.552.751	DAU	19.391.400	89,97

89	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	174.425.949	DAU	173.298.350	99,35
90	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	404.985.649	DAU	381.725.358	94,26

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DKPP Kab Kubu Raya Tahun 2025

Penjelasan:

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dapat merealisasikan anggaran sebesar 18.588.072.195 dari anggaran sebesar 19.448.050.988 (persentase capaian sebesar 95,58%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya, yang harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan. Setelah dilakukan pengukuran terhadap isu-isu strategis yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 maka dapat dirangkum pada kesimpulan dan saran untuk perbaikan berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 maka penilaian sasaran kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja utama nilai SAKIP SKPD dengan target 69,00 tercapai sebesar 70,30 Nilai capaian sasaran pertama sebesar 106,52 % dikategorikan **Sangat Memuaskan**.
2. Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan indikator kinerja utama PDRB SubSektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target 580.000.000,00 tercapai sebesar 615.000.000,00. Nilai capaian sasaran kedua sebesar 106,09% dikategorikan **Sangat Memuaskan**.
3. Sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya dengan indikator kinerja utama nilai skor pola pangan harapan dengan target 74,00 tercapai sebesar 79,00 Nilai capaian sasaran ketiga sebesar 106,76 % dikategorikan **Sangat Memuaskan**.

#### **B. Saran.**

1. Perlu penajaman indikator kinerja yang menjadi kewenangan pegawai fungsional tertentu dan fungsional umum / pelaksana agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara indikator kinerja umum dan indikator kinerja individual.
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
5. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang harus dilakukan secara konsisten direkomendasikan pada beberapa aspek sebagai berikut:
  - a. Perencanaan: Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang jelas sehingga mempermudah penyusunan strategi, tingkat pencapaian kinerja staf, pembagian tugas, penyusunan target, dan pengembangan organisasi.
  - b. Kontrol dan pengawasan: Pimpinan harus dapat menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan secara berkala dan mampu menjalankan peran sebagai pemecah masalah / pengambil keputusan pada setiap permasalahan yang ada.
  - c. Penghargaan: Pimpinan harus dapat memberikan penghargaan kepada bawahan untuk meningkatkan semangat bekerja. Penghargaan dapat berupa peningkatan gaji, bonus, cuti tambahan dan promosi jabatan.

Sungai Raya, 05 Januari 2026  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197405202000031005



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUJIWO, S.E.,M.Sos  
Jabatan : BUPATI KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

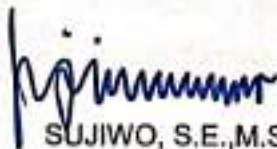
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI KUBU RAYA,

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
SUJIWO, S.E.,M.Sos

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

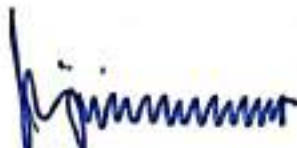
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian (Juta)	1.310.000
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	SKOR PPH	70,04
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP (Poin)	68,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan APBD/APBN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 15.376.374.873,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 79.158.744,-	APBD
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 143.152.481,-	APBD
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 185.788.180,-	APBD
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 38.128.606,-	APBD
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 918.111.461,-	APBD
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.088.619.072,-	APBD

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	556.536.971,-	APBD
9. Program Penyuluhan Pertanian	Rp	801.582.638,-	APBD
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>19.088.230.409,-</b>	<b>APBD</b>

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI KUBU RAYA

  
SUJIWO, S.E., M.Sos

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUMIJAN, SE, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TUMIJAN, SE, M.Si  
Pembina / IV-a  
NIP. 19710803 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No (1)	Sasaran Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%
	- Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	100%
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90 Unit
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
	- Perencanaan, Penganggaran dan	76.047.223,-	APBD

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.982.683.765,-	APBD
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.860.210,-	APBD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	170.162.300,-	APBD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.309.790,-	APBD
- Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	10.172.899,-	APBD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	726.910.809,-	APBD
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.005.260,-	APBD
<b>Total</b>	<b>15.277.152.256,-</b>	

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina (Tingkat I / IV-b)  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**TUMIJAN, SE, M.Si**  
Pembina / IV-a  
NIP. 19710803 199403 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN MARLINA S.Hut, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

  
IIN MARLINA S.Hut, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19710705 199703 2 008

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No (1)	Sasaran Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p>Meningkatkan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten (Poin)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)</li> </ul>	<p>71 Poin</p> <p>1 Laporan</p>
2	<p>Meningkatkan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li> <li>- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</li> </ul>	<p>Skor PPH (Poin)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)</li> <li>- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)</li> </ul>	<p>76 Poin</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
3	<p>Meningkatkan Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</li> <li>- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota</li> </ul>	<p>Tingkat Kerawanan Pangan (Poin)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Laporan)</li> <li>- Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</li> </ul>	<p>24 Poin</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
4	<p>Meningkatkan Program Pengawasan Keamanan Pangan</p>	<p>Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar</p>	<p>100%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</li> </ul>	<p>Mutu Yang Telah Ditetapkan (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)</li> </ul>	<p>1 Laporan</p>
--	--	---	------------------

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	<p>Meningkatkan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah /Kabupaten</li> </ul>	<p>79.158.744,-</p>	<p>APBD</p>
2.	<p>Meningkatkan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li> <li>- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</li> </ul>	<p>66.344.156,-</p> <p>76.808.325,-</p>	<p>APBD</p> <p>APBD</p>
3.	<p>Meningkatkan Program Penanganan Kerawanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</li> <li>- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota</li> </ul>	<p>11.520.342,-</p> <p>174.267.838,-</p>	<p>APBD</p>

4. Meningkatkan Program Pengawasan Keamanan Pangan		
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	38.128.606,-	APBD
<b>Total</b>	<b>446.228.011,-</b>	

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005



**IIN MARLINA S.Hut, MM**  
Pembina / IV-a  
NIP. 19710705 199703 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIYANDI RADSYI, SP, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

  
FITRIYANDI RADSYI, SP, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19731031 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program /Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>• Penjaminan Komurnian dan Kelostarian SDG Tanaman</li> </ul>	<p>Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)</li> <li>- Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian ( VUB )</li> </ul>	<p>3 Ton/Ha</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
2	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Prasarana Pertanian</li> </ul>	<p>Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Laporan)</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 Laporan</p>
3	<p>Meningkatkan Program Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</li> <li>- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</li> </ul>	<p>Persentase Perlindungan Pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)</li> <li>- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani ( Ha )</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>1 Laporan</p> <p>30 a</p>
4	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</li> </ul>	<p>Daya Dukung Prasarana Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian(%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>2 Laporan</p> <p>2 Laporan</p>

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	94.552.475,-	APBD
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian • Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	23.715.683,-	APBD
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	78.987.766,-	APBD
4.	Meningkatnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengembangan Prasarana Pertanian • Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	67.109.236,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>264.365.160,-</b>	

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

FITRIYANDI RADSYI, SP, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19731031 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWANSYAH, ST, MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



MARWANSYAH, ST, MT  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19740301 200312 1 004

**PERENCANAAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program /Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</li> </ul> </li> </ul>	<p>Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)</li> </ul> </li> </ul>	<p>3 Ton/Ha</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
2	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Prasarana Pertanian</li> </ul>	<p>Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 Laporan</p>

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	<p>Meningkatkan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</li> </ul> </li> </ul>	228.236.773,-	APBD

2.	Meningkatkan Penyediaan Pengembangan Pertanian	Program dan Prasarana Prasarana	1.021.509.836,-	APBD
	- Pembangunan Pertanian	Prasarana		
	<b>Total</b>		<b>1.249.746.609,-</b>	

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

MARWANSYAH, ST, MT  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19740301 200312 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abu Sufyandi, S.T  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520-20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PENYULUHAN

Abu Sufyandi, ST  
Pembina/ IV-a  
NIP. 19737212 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Program Penyuluhan Pertanian - Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina (%) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	100% 1 Laporan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Penyuluhan Pertanian - Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	801.582.638,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>801.582.638,-</b>	

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PENYULUHAN



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

**Abu Sufyandi, ST**  
Pembina/ IV-a  
NIP. 19731212 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNZIRIDIANSYAH, SP  
Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

MUNZIRIDIANSYAH, SP  
Pembina Tingkat I / IV-a  
NIP. 19811011 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program /Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</li> <li>• Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</li> <li>- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</li> <li>• Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</li> <li>• Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</li> </ul>	<p>Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)</li> <li>• Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian ( Laporan )</li> <li>- Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)</li> <li>• Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman ( Dokumen )</li> <li>• Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman ( Dokumen )</li> </ul>	<p>3,5 Ton/Ha</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Dokumen</p>
2	<p>Meningkatkan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</li> <li>• Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</li> </ul>	<p>Persentase Perlindungan Pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)</li> <li>• Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan ( Ha )</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 Laporan</p> <p>200 Ha</p>

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	• Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	401.465.074,-	APBD
	- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	485.598.525,-	APBD
	• Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	419.793.912,-	
	• Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.300.000,-	
2.	Meningkatkan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
	- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota		
	• Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	477.549.205,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>1.395.660.511,-</b>	

SUNGAI RAYA, MARET 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

MUNZIRIDIANSYAH, SP  
Pembina Tingkat I / IV-a  
NIP. 19811011 201001 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUJIWO, S.E.,M.Sos  
Jabatan : BUPATI KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI KUBU RAYA,

  
SUJIWO, S.E.,M.Sos

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-a  
NIP. 19740520 20003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian (Juta)	1.310.000
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	SKOR PPH	70,04
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Nilai SAKIP (Poin)	68,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan APBD/APBN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 15.168.298.391,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 76.758.744,-	APBD
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 140.852.481,-	APBD
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 433.672.860,-	APBD
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 35.828.606,-	APBD
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 859.182.391,-	APBD
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1 076 699 072,-	APBD

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	551.936.971,-	APBD
9. Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.104.821.472,-	APBD
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>19.448.050.988,-</b>	<b>APBD</b>

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI KUBU RAYA

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
SUJIWO, S.E.,M.Sos

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-a  
NIP. 19740520 20003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUMIJAN, SE, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
TUMIJAN, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19710803 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%
	- Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	20 Unit
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	90 Unit

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	71.725.158,-	APBD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.825.619.274,-	APBD
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14.860.210,-	APBD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	149.336.300,-	APBD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.488.482,-	APBD
- Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	10.172.899,-	APBD
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	772.976.451,-	APBD
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.119.617,-	APBD
<b>Total</b>	<b><u>15.168.298.391,-</u></b>	

SUNGGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TUMIJAN, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19710803 199403 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWANSYAH, ST, MT

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 200003 1 005

  
MARWANSYAH, ST, MT  
Pembina / IV-a  
NIP. 19740301 200312 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program /Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</li> <li>• Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</li> </ul>	<p>Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)</li> <li>• Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)</li> </ul>	<p>3 Ton/Ha</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
2	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Prasarana Pertanian</li> </ul>	<p>Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 Laporan</p>

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	<p>Meningkatkan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</li> <li>• Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</li> </ul>	23.736.293,-	APBD

2.	Meningkatkan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pembangunan Prasarana Pertanian	1.011.789.836,-	APBD
<b>Total</b>			<b>1.035.526.129,-</b>	

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 200003 1 005



**MARWANSYAH, ST, MT**  
Pembina / IV-a  
NIP. 19740301 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNZIRIDIANSYAH, SP  
Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

  
MUNZIRIDIANSYAH, SP  
Pembina / IV-a  
NIP. 19811011 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No.	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</li> <li>• Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</li> <li>- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</li> <li>• Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</li> <li>• Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</li> </ul>	<p>Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)</li> <li>• Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian ( Laporan )</li> <li>- Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)</li> <li>• Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman ( Dokumen )</li> <li>• Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman ( Dokumen )</li> </ul>	<p>3,5 Ton/Ha</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Dokumen</p>
2	<p>Meningkatkan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</li> <li>• Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</li> </ul>	<p>Persentase Perlindungan Pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)</li> <li>• Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan ( Ha )</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 Laporan</p> <p>200 Ha</p>

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
	• Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	204.392.618,-	APBD
	- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota		
	• Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	315.193.912,-	APBD
2.	Meningkatkan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
	- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota		
	• Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	472.949.205,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>992.535.735,-</b>	

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

**MUNZIRIDIANSYAH, SP**  
Pembina / IV-a  
NIP. 19811011 201001 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABU SUFYANDI, S.T  
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYULUHAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PENYULUHAN

  
ABU SUFYANDI, ST  
Pembina/ IV-a  
NIP. 19731212 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Program Penyuluhan Pertanian - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina (%) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Laporan)	100% 1 Laporan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Penyuluhan Pertanian - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.104.821.472,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>1.104.821.472,-</b>	

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
**AWALUDDIN, SP**  
Pembina/ Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PENYULUHAN

  
**ABU SUFYANDI, ST**  
Pembina/ IV-a  
NIP. 19731212 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN MARLINA S.Hut, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

  
IIN MARLINA S.Hut, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19710705 199703 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten (Poin) - Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	71 Poin  1 Laporan
2	Meningkatkan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor PPH (Poin) - Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)	76 Poin 1 Laporan  1 Laporan
3	Meningkatkan Program Penanganan Kerawanan Pangan - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Tingkat Kerawanan Pangan (Poin) - Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Laporan) - Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	24 Poin  1 Laporan  1 Laporan
4	Meningkatkan Program Pengawasan Keamanan Pangan - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan (%) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	100%  1 Laporan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Meningkatkan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah /Kabupaten	76.758.744,-	APBD
2.	Meningkatkan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	66.344.156,-  74.508.325,-	APBD  APBD
3.	Meningkatkan Program Penanganan Kerawanan Pangan - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	11.520.342,-  422.152.518,-	APBD
4.	Meningkatkan Program Pengawasan Keamanan Pangan - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	35.828.606,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>446.228.011,-</b>	

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 20003 1 005

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'IIN Marlina S. Hut.'.

IIN MARLINA S.Hut, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19710705 199703 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II, Desa Limbung Telp.(0561) 713955

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIYANDI RADSYI, SP, MM  
Jabatan : KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AWALUDDIN, SP  
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

FITRIYANDI RADSYI, SP, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19731031 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

No. (1)	Sasaran Program /Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>• Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman</li> </ul>	<p>Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)</li> <li>- Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian ( VUB )</li> </ul>	<p>3 Ton/Ha</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
2	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Prasarana Pertanian</li> </ul>	<p>Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Laporan)</li> </ul>	<p>100%</p> <p>1 Laporan</p>
3	<p>Meningkatkan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota</li> <li>- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</li> </ul>	<p>Persentase Perlindungan Pertanian (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Laporan)</li> <li>- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani ( Ha )</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>1 Laporan</p> <p>30 Ha</p>
4	<p>Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</li> </ul>	<p>Daya Dukung Prasarana Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian(%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>2 Laporan</p> <p>2 Laporan</p>


No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	292.152.475,-	APBD
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian • Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	23.707.093,-	APBD
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	78.987.766,-	APBD
4.	Meningkatnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengembangan Prasarana Pertanian • Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	64.909.236,-	APBD
	<b>Total</b>	<b>459.756.570,-</b>	

SUNGAI RAYA, OKTOBER 2025

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

  
AWALUDDIN, SP  
Pembina Tingkat I / IV-b  
NIP. 19740520 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

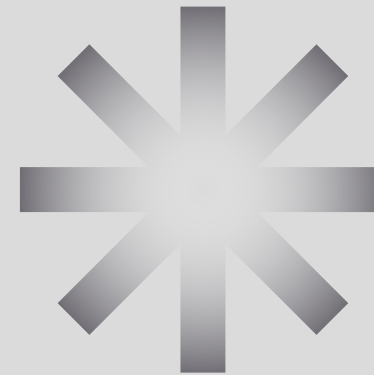
  
FITRIYANDI RADSYI, SP, MM  
Pembina / IV-a  
NIP. 19731031 199903 1 004

**RENCANA AKSI**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**KABUPATEN KUBU RAYA**

**TA 2025**



## Rencana Aksi DKPP TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				Anggaran	Penanggung Jawab	
			TW . I	TW . II	TW . III	TW . IV				TW . I	TW . II	TW . III	TW . IV		Pengawas	Administrator
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD (Poin)	16,50	16,50	16,50	16,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(Poin)	16,5	16,5	16,5	16,5	15.329.952.256		
2							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dokumen)	1,5	1,5	1,50	1,50	76.047.223		
3							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dokumen)	1	1	1,00	1,00	27.353.038		Sekretaris Dinas
4							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	5.973.646		Sekretaris Dinas
5							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	42.720.539		Sekretaris Dinas
6							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Persen)	0,25	0,25	0,25	0,25	13.982.683.765		
7							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang/Bulan)	25,5	25,5	25,50	25,50	13.967.636.660		Sekretaris Dinas
8							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	(Dokumen)					0		
9							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	15.047.105		Sekretaris Dinas
10							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Persen)	0,25	0,25	0,25	0,25	14.860.210		
11							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	14.860.210		Sekretaris Dinas
12							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Persen)	25,5	25,5	25,50	25,50	170.162.300		
13							Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	(Paket)	0,25	0,25	0,25	0,25	76.942.495		Sekretaris Dinas
14							Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	9.999.045		Sekretaris Dinas
15							Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(Orang)	3	3	3,00	3,00	38.443.000		Sekretaris Dinas
16							Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Orang)	12,5	12,5	12,50	12,50	8.396.415		Sekretaris Dinas

17							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Orang)	0,75	0,75	0,75	0,75	36.381.345		Sekretaris Dinas
18							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Persen)					83.309.790		
19							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Paket)	0,25	0,25	0,25	0,25	5.560.000		Sekretaris Dinas
20							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Paket)	0,25	0,25	0,25	0,25	12.139.175		Sekretaris Dinas
21							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Paket)	0,25	0,25	0,25	0,25	3.045.776		Sekretaris Dinas
22							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	3.553.850		Sekretaris Dinas
23							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	51.089.018		Sekretaris Dinas
24							Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	7.921.971		Sekretaris Dinas
25							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	(Unit)	5	5	5,00	5,00	10.172.899		
26							Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(Unit)	5	5	5,00	5,00	10.172.899		Sekretaris Dinas
27							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	779.710.809		
28							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	116.709.960		Sekretaris Dinas
29							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(Laporan)	0,5	0,5	0,50	0,50	663.000.849		Sekretaris Dinas
30							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	(Persen)	13,75	13,75	13,75	13,75	213.005.260		
31							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	(Unit)	0,25	0,25	0,25	0,25	39.994.158		Sekretaris Dinas
32							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Unit)	8,75	8,75	8,75	8,75	59.763.102		Sekretaris Dinas
33							Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	(Unit)	2,25	2,25	2,25	2,25	12.418.000		Sekretaris Dinas
34							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	(Unit)	0,75	0,75	0,75	0,75	100.830.000		Sekretaris Dinas
35	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)				18,50	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten	(Poin)	25	25	25,00	25,00	79.158.744		

36							Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	79.158.744		
37							Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota yang Tersedia	(Unit)	0,25	0,25	0,25	0,25	79.158.744		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
38							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	(Poin)	19,76	19,76	19,76	19,76	143.152.481		
39							Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	66.344.156		
40							Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten / Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	43.565.026		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
41							Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	5.416.592		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
42							Sub Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten / Kota	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	11.651.617		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
43							Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	5.710.921		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
44							Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	76.808.325		
45							Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	4.867.300		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
46							Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	71.941.025		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
47							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	(Persen)	2,75	2,75	2,75	2,75	327.348.180		
48							Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	11.520.342		
49							Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	11.520.342		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
50							Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	315.827.838		
51							Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	220.176.482		Kepala Bidang Ketahanan Pangan

52							Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	90.990.385		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
53							Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	4.660.971		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
54							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	(Persen)	25	25	25,00	25,00	38.128.606		
55							Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	38.128.606		
56							Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	38.128.606		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
57		PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Juta Rupiah)				145.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian	(Ton/Ha)	0,75	0,75	0,75	0,75	1.177.795.461		
58							Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	561.149.074		
59							Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	228.236.773		Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
60							Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	309.196.618		Kepala Bidang Tanaman Pangan
61							Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji / Benih	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji / Benih Yang Diperbanyak	(Ton)					0		
62							Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Yang Diperbanyak	(Setek)					0		
63							Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	(Laporan)					0		
64							Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	23.715.683		Kepala Bidang Hortikultura
65							Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	(Laporan)					0		
66							Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	(Laporan)					0		
67							Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	616.646.387		
68							Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	(Dokumen)	0,25	0,25	0,25	0,25	419.793.912		Kepala Bidang Tanaman Pangan

69							Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	(Dokumen)					2.300.000		Kepala Bidang Tanaman Pangan
70							Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	(VUB)	0,25	0,25	0,25	0,25	194.552.475		Kepala Bidang Hortikultura
71							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian	(Persen)	25	25	25,00	25,00	1.088.619.072		
72							Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	67.109.236		
73							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	67.109.236		Kepala Bidang Hortikultura
74							Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	(Unit)					0		
75							Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	(Unit)					0		
76							Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	1.021.509.836		
77							Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	(Unit)					0		
78							Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	(Unit)	3,75	3,75	3,75	3,75	636.970.973		
79							Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	(Unit)	0,5	0,5	0,50	0,50	2.400.000		
80							Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	(Unit)					0		
81							Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	(Unit)	2	2	2,00	2,00	188.628.754		Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
82							Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara	(Unit)	1	1	1,00	1,00	193.510.109		Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
83							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Perlindungan Pertanian	(Persen)	20	20	20,00	20,00	556.536.971		
84							Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	556.536.971		
85							Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	(Ha)	75	75	75,00	75,00	477.549.205		Kepala Bidang Tanaman Pangan
86							Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	(Ha)	10	10	10,00	10,00	78.987.766		Kepala Bidang Hortikultura
87							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	(Persen)	25	25	25,00	25,00	1.179.382.638		

88							Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	(Laporan)	0,25	0,25	0,25	0,25	1.179.382.638		
89							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	(Unit)	2,25	2,25	2,25	2,25	520.495.620		Kepala Bidang Penyuluhan
90							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	(Unit)	7,5	7,5	7,50	7,50	43.461.503		Kepala Bidang Penyuluhan
91							Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	(Unit)	2,25	2,25	2,25	2,25	21.562.751		Kepala Bidang Penyuluhan
92							Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	(Unit)	2,5	2,5	2,50	2,50	188.887.115		Kepala Bidang Penyuluhan
93							Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	(Orang)	14,75	14,75	14,75	14,75	404.985.649		Kepala Bidang Penyuluhan
							JUMLAH							19.920.074.409		



Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Kubu Raya

Awaluddin, SP

N/P. 19740520 200003 1 005

**BERITA ACARA**  
**Nomor: 520 / 001 / DKPP / 2026**

Pada hari ini SENIN tanggal LIMA Bulan JANUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I	Nama Nip Pangkat / Gol Ruang Jabatan	:	Awaluddin, SP : 197405202000031005 : Pembina Tingkat I / IVB : Kepala Dinas Sebagai Ketua Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya
II	Nama Nip Pangkat / Gol Ruang Jabatan	:	Tumijan, SE., M.Si. : 197108031994031001 : Pembina Tingkat I / IVB : Sekretaris Sebagai Sekretaris Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya
III	Nama Nip Pangkat / Gol Ruang Jabatan	:	Supriyono, S.Pt., M.Eng. : 198005312006041006 : Penata Muda Tingkat I / IIID : Perencana Ahli Muda Sebagai Anggota Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan pembahasan penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman penyusunan yaitu Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan pembahasan terhadap laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan laporan yang disajikan. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.


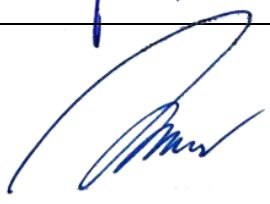

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti diatur dalam Permen PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

2. Perjanjian kinerja berjenjang baru sampai 3 level saja yaitu (1) Bupati dengan Eselon II; (2) Eselon II dengan Eselon III, dan (3) Eselon III dengan Eselon IV. Perjanjian kinerja berjenjang antara Eselon IV dan staf belum dilakukan karena belum dirumuskan indikator yang jelas antara Eselon IV dan staf.
3. Terdapat keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
4. Perlu penajaman indikator kinerja yang menjadi kewenangan pegawai fungsional tertentu dan fungsional umum / pelaksana agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara indikator kinerja umum dan indikator kinerja individual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sungai Raya, 5 Januari 2026  
 Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja  
 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Awaluddin, SP	Kepala Dinas	
2	Tumijan, SE., M.Si.	Sekretaris	
3	Supriyono, S.Pt., M.Eng.	Perencana Ahli Muda	



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN  
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN (IKSK) DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 62 Tahun 2010 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagian huruf a, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana di atur dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

*Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

6. Peraturan bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah tahun 2025-2026
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN (IKSK) DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 – 2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) DAN Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya Tahun 2025-2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



AWALUDDIN, SP

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN KUBU RAYA  
 NOMOR 08 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU  
 RAYA TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025- 2026

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Indikator	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	Poin	Penilaian SAKIP SKPD melalui pengisian jawaban yang dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria, dengan pilihan jawaban AA / A /BB / CC / C / D / E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut: (1) AA dengan nilai 100; (2) A dengan nilai > 90; (3) BB dengan nilai > 80; (4) B dengan nilai > 70; (5) CC dengan nilai > 60; (6) C dengan nilai >50; (7) D dengan nilai > 30; dan (8) E dengan nilai > 0.	LHE Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian	Rupiah	PDRB sub sektor pertanian yang dihitung adalah PDRB sub sektor pertanian (tanpa kehutanan dan perikanan) yang terdiri dari (1) tanaman pangan; (2) tanaman hortikultura semusim; (3) tanaman hortikultura tahunan dan lainnya; (4) peternakan dan (5) jasa pertanian dan perburuan	BPS Kabupaten Kubu Raya

3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kubu Raya	Skor PPH	Poin	Skor PPH Padi-Padian (1) + Skor PPH Umbi-Umbian (2) + Skr PPH Pangan Hewani (3) + Skor PPH Minyak dan Lemak (4) + Skor PPH Buah/ Biji Berminyak (5) + Skor PPH Kacang-Kacangan (6) + Skor PPH Gula (7) + Skor PPH Sayur dan Buah (8) + Skor PPH Lain-Lain (9)	Bapanas
----	---	----------	------	---	---------

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



AWALUDDIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197405202000031005

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN KUBU RAYA  
 NOMOR 08 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DI LINGKUNGAN DINAS  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KUBU  
 RAYA TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2025-2026

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target 2025-2026</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ( dokumen)</i>	11	DKPP KKR
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1	DKPP KKR
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( Unit)	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	40	DKPP KKR
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah ( Laporan)</i>	2	DKPP KKR
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( Unit)	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</i>	110	DKPP KKR
6.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ( Unit)	<i>Jumlah infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	2	DKPP KKR
7.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	2	DKPP KKR
8.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi ( Laporan)	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	2	DKPP KKR
9.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2	DKPP KKR

10.	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar</i>	2	DKPP KKR
11	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	2	DKPP KKR
12.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro Organisme</i>	2	DKPP KKR
13.	engembangan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian<sup>2</sup></i>	2	DKPP KKR
14.	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian<sup>2</sup></i>	2	DKPP KKR
15.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	2	DKPP KKR

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



AWALUDDIN  
Dembina Tingkat I  
NIP. 197405202000031005

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
 PERTANIAN KUBU RAYA  
 NOMOR 08 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN (IKSK) DI LINGKUNGAN  
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN  
 KUBU RAYA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA SUBKEGIATAN (IKSK) 2025 - 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025-2026	Sumber Data
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	DKPP KKR
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD( Dokumen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	DKPP KKR
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	DKPP KKR
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207	DKPP KKR
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	DKPP KKR
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	DKPP KKR
7.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	DKPP KKR
8.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	DKPP KKR
9.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	DKPP KKR

10.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	DKPP KKR
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	DKPP KKR
12.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	DKPP KKR
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	DKPP KKR
14.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	DKPP KKR
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	DKPP KKR
17.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	DKPP KKR
18.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	DKPP KKR
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	DKPP KKR
20.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	DKPP KKR
21.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	DKPP KKR
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	D KPP KKR
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	DKPP KKR
24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	DKPP KKR
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	DKPP KKR

26.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	DKPP KKR
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	DKPP KKR
28.	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	DKPP KKR
29.	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 laporan	DKPP KKR
30.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	DKPP KKR
31.	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	DKPP KKR
32.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	DKPP KKR
33.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	DKPP KKR
34.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	DKPP KKR
35.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2 laporan	DKPP KKR
36.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	DKPP KKR
37.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	DKPP KKR
38.	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2 Dokumen	DKPP KKR
39.	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	DKPP KKR

40.	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	DKPP KKR
41.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	DKPP KKR
42.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	DKPP KKR
43.	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	DKPP KKR
44.	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	15000 Setek	DKPP KKR
45.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	2 Laporan	DKPP KKR
46.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	2 Laporan	DKPP KKR
47.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	DKPP KKR
48.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	2 Laporan	DKPP KKR
49.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	DKPP KKR
50.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	DKPP KKR
51.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru	DKPP KKR
52.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	DKPP KKR
53.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	24 Unit	DKPP KKR
54.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	12 Unit	DKPP KKR

55.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	DKPP KKR
56.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	DKPP KKR
57.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	DKPP KKR
58.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	DKPP KKR
59.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	DKPP KKR
60.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	8 Unit	DKPP KKR
61.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	800 Ha	DKPP KKR
62.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	90 Ha	DKPP KKR
63.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Unit	DKPP KKR
64.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Unit	DKPP KKR

65.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18 Unit	DKPP KKR
66.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	27 Unit	DKPP KKR
67.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	119 Orang	DKPP KKR



Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya

AWALUDDIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197405202000031005



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II Telp (0561) 710500 Fax (0561) 713955

Email: dkppkkr@gmail.com

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB KUBU RAYA**  
**TAHUN 2025**

Berdasarkan dokumen rencana strategis SKPD 2025-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 terdiri dari tiga yaitu:

1. Nilai SAKIP SKPD adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan penunjang pemerintahan.
2. PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan bidang pertanian.
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan bidang pangan.

Perhitungan indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Nilai SAKIP SKPD

Perhitungan Nilai SAKIP SKPD didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Nomor: 700.1.2.8 / 58 / Inspt, tanggal 12 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir.

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKU Tahun 2025} &= \frac{\text{Nilai LAKIP Tahun ini}}{\text{Nilai LAKIP Target Tahun ini}} \times 100\% \\ &= \frac{70,30}{69,00} \times 100\% \\ &= 106,52 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Nilai SAKIP SKPD Tahun 2025 sebesar 106,52 %.

2. PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sehubungan dengan belum terbitnya data PDRB Tahun 2025 maka data yang digunakan mengacu pada data tahun 2024 mengacu pada Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. Data yang dihitung sebagai berikut.

No	Sub Sektor	Nilai (Rupiah)
1	Tanaman Pangan	387.070.000
2	Tanaman Hortikultura	228.260.000
	Jumlah Tahun 2025	615.330.000
	Target Tahun 2025	580.000.000

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKU Tahun 2025} &= \frac{\text{PDRB Tahun ini}}{\text{PDRB Target Tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{615.330.000}{580.000.000} \times 100\% \\
 &= 106,09 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 sebesar 106,09%. Sebagai data pendukung perhitungan maka dilampirkan dokumen BPS sebagaimana terlampir.

### 3. Skor Pola Pangan Harapan

Perhitungan Skor PPh didasarkan pada Laporan Analisa Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKU Tahun 2025} &= \frac{\text{Nilai Skor PPH Tahun ini}}{\text{Nilai Skor PPH Target Tahun ini}} \times 100\% \\
 &= \frac{74,00}{79,00} \times 100\% \\
 &= 106,76 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Nilai Skor PPh Tahun 2025 sebesar 106,76 %.

Sungai Raya, 05 Januari 2026  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19740520 200003 1 005

# KABUPATEN KUBU RAYA

DALAM

# ANGKA

*KUBU RAYA REGENCY IN FIGURES*

# 2025

*Volume 18, 2025*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUBU RAYA**  
*BPS-Statistics Kubu Raya Regency*



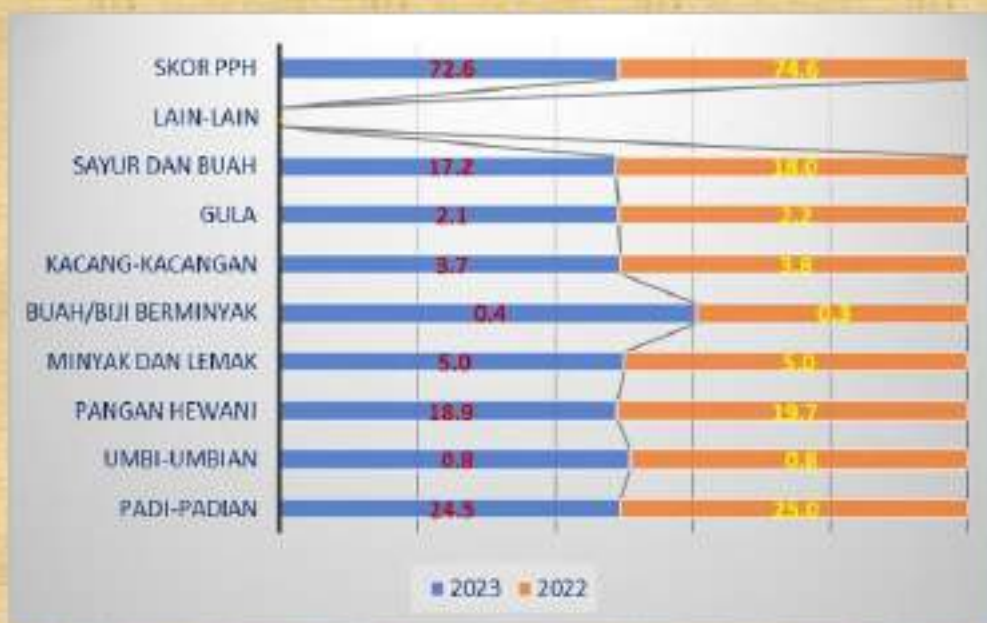
**Tabel 12.2** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kubu Raya (miliar rupiah), 2020–2024  
**Gross Regional Domestic Product at 2011 Constant Market Prices by Industry in Kubu Raya Regency (billion rupiahs), 2020–2024**

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.863,77	2.966,90	3.004,62	3.018,15	3.151,60
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	536,32	582,32	610,81	663,32	692,37
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5.975,48	6.418,61	6.827,26	6.965,22	7.176,99
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	61,60	62,36	64,36	76,39	81,89
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,10	8,61	9,37	9,88	10,23
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.975,01	2.149,03	2.192,57	2.308,14	2.423,22
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.854,56	1.916,28	2.031,07	2.240,55	2.416,19
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.055,57	927,97	1.173,76	1.238,71	1.277,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	265,80	290,63	317,11	343,77	371,55
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	884,01	959,01	1.020,44	1.120,14	1.191,45

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.775,80	2.966,90	3.000,07	3.044,90	3.151,60
2	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.609,64	2.609,64	2.641,27	2.680,74	2.774,68
3	Tanaman Pangan	371,71	371,71	368,46	373,96	387,07
4	Tanaman Hortikultura	217,66	217,66	217,29	220,54	228,26
5	Tanaman Perkebunan	1.346,33	1.346,33	1.380,82	1.401,46	1.450,57
6	Peternakan	605,52	605,52	605,81	614,86	636,41
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	68,42	68,42	68,89	69,92	72,37
8	Kehutanan dan Penebangan Kayu	147,59	147,59	147,94	150,15	155,41
9	Perikanan	209,67	209,67	210,86	214,01	221,51
	Kabupaten	17.831,73	18.754,97	19.783,11	20.768,22	21.794,06



## LAPORAN ANALISA POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023



#### D. Proyeksi Skor PPH Kabupaten Kubu Raya

Pada tahun 2023 skor PPH dihitung dengan menggunakan aplikasi harmonisasi PPH konsumsi pangan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Susenas (Survey Ekonomi Nasional), hasil penghitungan proyeksi skor PPH di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tahun 2023

DIKIS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA  
JALAN ANGKASA PURA II DESA LUMBING

SASARAN POLA PANGAN KABUPATEN KONSUMSI PANGAN PERDIKUM  
BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Padi-padi	24,5	24,5	24,6	24,6	24,7	24,8	24,9
2	Umbi-umbi	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,2
3	Pangan Hewani	26,8	18,5	20,1	20,7	21,3	21,9	23,1
4	Minyak dan Lemak	5,8	5,0	5,8	5,8	5,0	5,0	5,8
5	Buah/Biji Bermanis	6,4	8,5	10,5	6,6	8,7	8,9	8,9
6	Bacang-kacangan	2,7	4,4	5,2	5,9	6,6	7,4	8,9
7	Gula	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4
8	Susu dan Basi	17,2	18,7	20,2	21,7	22,2	24,7	27,7
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>72,6</b>	<b>75,8</b>	<b>79,8</b>	<b>81,2</b>	<b>85,4</b>	<b>88,5</b>	<b>95,6</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Angkasa Pura II Telp. (0561) 723700 Fax. (0561) 723700  
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Nomor : 700.1.2.8/ 58 Inspt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2024

Sungai Raya, 12 Juni 2025

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
di -  
Sungai Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
  - a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan terhadap keberadaan, kualitas dan pemanfaatan atas kelengkapan Dokumen pendukung pada komponen yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Setiap Sub Komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir disetiap komponen)

4. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperoleh nilai sebesar 70,30 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
A	Perencanaan Kinerja	30	22,20	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	19,20	19,20
C	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,40	70,30

5. Rekomendasi :

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2024, kami merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan evaluasi data kinerja.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Inspektur Daerah,



*[Signature]*  
Pardito, Ak.MM, CA, CFA, CGCAE  
Pemimpin Utama Muda/1c  
NIP. 19720627 199302 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kubu Raya; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II Telp (0561) 710500 Fax (0561) 713955

Email: dkppkkr@gmail.com

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

---

**PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB KUBU RAYA**  
**TAHUN 2025**

Berdasarkan dokumen rencana strategis SKPD 2025-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 terdiri dari tiga yaitu:

1. Nilai SAKIP SKPD adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan penunjang pemerintahan.
2. PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan bidang pertanian.
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan urusan bidang pangan.

Perhitungan indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Nilai SAKIP SKPD

Perhitungan Nilai SAKIP SKPD didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Nomor: 700.1.2.8 / 58 / Inspt, tanggal 12 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir.

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKU Tahun 2025} &= \frac{\text{Nilai LAKIP Tahun ini}}{\text{Nilai LAKIP Target Tahun ini}} \times 100\% \\ &= \frac{70,30}{69,00} \times 100\% \\ &= 106,52\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Nilai SAKIP SKPD Tahun 2025 sebesar 106,52 %.

2. PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sehubungan dengan belum terbitnya data PDRB Tahun 2025 maka data yang digunakan mengacu pada data tahun 2024 mengacu pada Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. Data yang dihitung sebagai berikut.

No	Sub Sektor	Nilai (Rupiah)
1	Tanaman Pangan	387.070.000
2	Tanaman Hortikultura	228.260.000
	Jumlah Tahun 2025	615.330.000
	Target Tahun 2025	580.000.000

$$\begin{aligned}
\text{Capaian IKU Tahun 2025} &= \frac{\text{PDRB Tahun ini}}{\text{PDRB Target Tahun ini}} \times 100\% \\
&= \frac{615.330.000}{580.000.000} \times 100\% \\
&= 106,09 \%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 sebesar 106,09%. Sebagai data pendukung perhitungan maka dilampirkan dokumen BPS sebagaimana terlampir.

### 3. Skor Pola Pangan Harapan

Perhitungan Skor PPh didasarkan pada Laporan Analisa Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir.

$$\begin{aligned}
\text{Capaian IKU Tahun 2025} &= \frac{\text{Nilai Skor PPH Tahun ini}}{\text{Nilai Skor PPH Target Tahun ini}} \times 100\% \\
&= \frac{74,00}{79,00} \times 100\% \\
&= 106,76 \%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Nilai Skor PPh Tahun 2025 sebesar 106,76 %.

Sungai Raya, 05 Januari 2026  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



**AWALUDDIN, SP**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19740520 200003 1 005

# KABUPATEN KUBU RAYA

DALAM

# ANGKA

*KUBU RAYA REGENCY IN FIGURES*

# 2025

*Volume 18, 2025*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUBU RAYA**  
*BPS-Statistics Kubu Raya Regency*



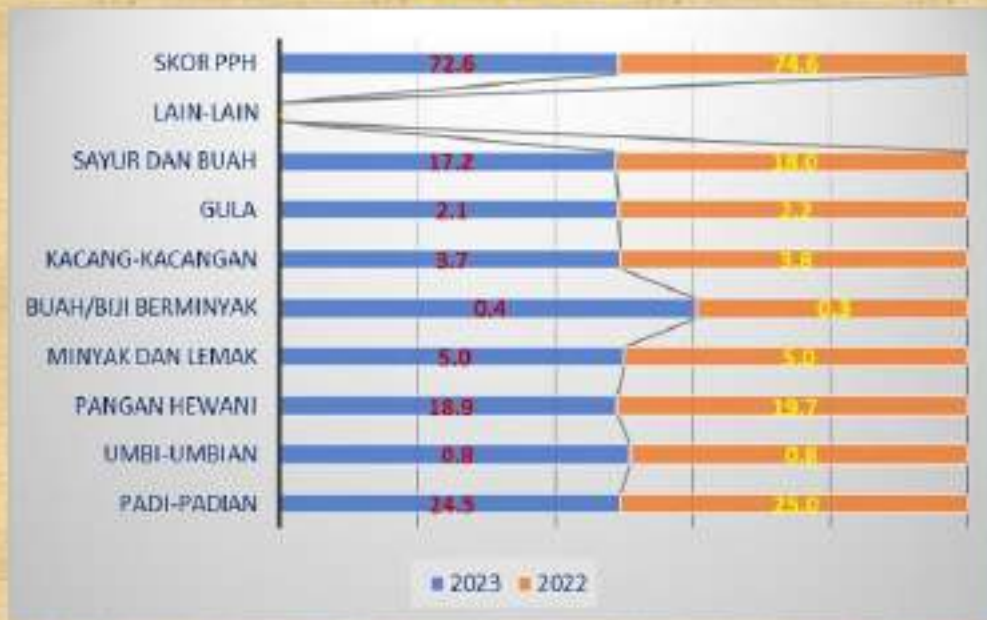
**Tabel 12.2** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kubu Raya (miliar rupiah), 2020–2024  
**Gross Regional Domestic Product at 2011 Constant Market Prices by Industry in Kubu Raya Regency (billion rupiahs), 2020–2024**

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.863,77	2.966,90	3.004,62	3.018,15	3.151,60
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	536,32	582,32	610,81	663,32	692,37
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5.975,48	6.418,61	6.827,26	6.965,22	7.176,99
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	61,60	62,36	64,36	76,39	81,89
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,10	8,61	9,37	9,88	10,23
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.975,01	2.149,03	2.192,57	2.308,14	2.423,22
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.854,56	1.916,28	2.031,07	2.240,55	2.416,19
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.055,57	927,97	1.173,76	1.238,71	1.277,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	265,80	290,63	317,11	343,77	371,55
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	884,01	959,01	1.020,44	1.120,14	1.191,45

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.775,80	2.966,90	3.000,07	3.044,90	3.151,60
2	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.609,64	2.609,64	2.641,27	2.680,74	2.774,68
3	Tanaman Pangan	371,71	371,71	368,46	373,96	387,07
4	Tanaman Hortikultura	217,66	217,66	217,29	220,54	228,26
5	Tanaman Perkebunan	1.346,33	1.346,33	1.380,82	1.401,46	1.450,57
6	Peternakan	605,52	605,52	605,81	614,86	636,41
7	Jasa Pertanian dan Perburuan	68,42	68,42	68,89	69,92	72,37
8	Kehutanan dan Penebangan Kayu	147,59	147,59	147,94	150,15	155,41
9	Perikanan	209,67	209,67	210,86	214,01	221,51
	Kabupaten	17.831,73	18.754,97	19.783,11	20.768,22	21.794,06



## LAPORAN ANALISA POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023



#### D. Proyeksi Skor PPH Kabupaten Kubu Raya

Pada tahun 2023 skor PPH dihitung dengan menggunakan aplikasi harmonisasi PPH konsumsi pangan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Susenas (Survey Ekonomi Nasional), hasil penghitungan proyeksi skor PPH di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Tahun 2023

DIKIS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN KUBU RAYA  
JALAN ANGKASA PURA II DESA LUMBING

SASARAN POLA PANGAN KABUPATEN KONSUMSI PANGAN PERDIKUM  
BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Padi-padi	24,5	24,5	24,6	24,6	24,7	24,8	24,9
2	Umbi-umbi	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,2
3	Pangan Hewani	26,8	18,5	20,1	20,7	21,3	21,9	23,1
4	Minyak dan Lemak	5,8	5,0	5,8	5,8	5,0	5,0	5,8
5	Buah/Biji Bermanis	6,4	8,5	9,5	6,6	8,7	8,9	8,9
6	Bacang-kacangan	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6	7,4	8,9
7	Gula	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4
8	Susu dan Basi	17,2	18,7	20,2	21,7	22,2	24,7	27,7
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>72,6</b>	<b>75,8</b>	<b>79,8</b>	<b>81,2</b>	<b>85,4</b>	<b>88,5</b>	<b>95,6</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Angkasa Pura II Telp. (0561) 723700 Fax. (0561) 723700  
Sungai Raya

Kode Pos 78381

Nomor : 700.1.2.8/ 58 Inspt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2024

Sungai Raya, 12 Juni 2025

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
di -  
Sungai Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
  - a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan terhadap keberadaan, kualitas dan pemanfaatan atas kelengkapan Dokumen pendukung pada komponen yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Setiap Sub Komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir disetiap komponen)

4. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperoleh nilai sebesar 70,30 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
A	Perencanaan Kinerja	30	22,20	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	19,20	19,20
C	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,40	70,30

5. Rekomendasi :

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2024, kami merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan evaluasi data kinerja.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Inspektur Daerah,



*[Signature]*  
 P. P. Ardito, Ak.MM, CA, CFA, CGCAE  
 Pembina Utama Muda/IVc  
 NIP. 19720627 199302 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kubu Raya; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KUBU RAYA**

**KERTAS KERJA KOREKSI LKJIP Tahun 2025**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  
 Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
 Tahun Anggaran : 2025  
 Tujuan : Untuk menyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format dan sistematika laporan kinerja

**FORMAT LAPORAN KINERJA TAHUN 2025**

NO	KRITERIA KOREKSI	LAMP II PERMENPAN RB NO 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KET
1	2	3	4	5	6
1	Format Badan LKJ	Apakah Badan/Daftar Isi LKj telah sesuai dengan Permenpan RB No 53 Tahun 2014	√		
2	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :	√		
		<b>BAB I Pendahuluan</b>	√		
		Apakah telah memuat 2 sub bab:			
		<b>A. Gambaran Umum</b>	√		
		1. Apakah kedudukan PD dalam sub bab A telah disesuaikan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perda KKR Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup	√		
		2. Apakah hal-hal lain yang berpengaruh telah memuat sekurang-kurangnya SDA, sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan.	√		
		3. Apakah data-data telah di-update berdasarkan data per tahun LKj	√		
		<b>B. Permasalahan Utama</b>	√		
		<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	√		
		Apakah telah memuat 2 sub bab:			
		<b>A. Renstra</b>	√		
		Apakah sub bab A tentang renstra telah memuat sekurang-kurangnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU PD	√		
		<b>B. Perjankin Perubahan 2025</b>	√		
		Apakah sub B tentang PERJANKIN telah disesuaikan dengan PERMENPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014	√		
		<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	√		
		Apakah telah memuat 2 sub bab:			
		<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>	√		
		1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini;	√		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		

NO	KRITERIA KOREKSI	LAMP II PERMENPAN RB NO 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KET
1	2	3	4	5	6
		<b>B. Realisasi Anggaran</b>	√		
		Apakah sub bab B tentang Realisasi Anggaran telah menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.		√	
		<b>BAB IV Penutup</b>	√		
		Apakah Bab IV telah memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	√		
		<b>LAMPIRAN:</b>	√		
		1. Perjankin Perubahan Tahun 2025		√	
		2. Lain-lain yang dianggap perlu	√		
3.	Ukuran Kertas	1. A4	√		
4.	Ketepatan Waktu	1. Ketepatan waktu penyampaian LKJ	√		

CATATAN KHUSUS : Hal ii Daftar Isi disesuaikan dengan catatan yang diperbaiki;  
BAB II Perencanaan Kinerja bagian Perjanjian Kinerja disesuaikan Perjankin Perubahan Berjenjang;  
BAB IV Penutup ditanda tangani oleh Kepala PD;  
BA Pendatanganan PK;  
Formulir Pengukuran Kinerja;  
Lampiran LHE 2024 dari TPI Inspektorat Daerah yang sudah ditindaklanjuti; dan  
Lembar asistensi dilampirkan juga pada halaman terakhir LKJIP ini.

Sungai Raya, 23 Januari 2026  
Koridor,

(Antoni, S.I.P)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jalan Angkasa Pura II Telp (0561) 710500 Fax (0561) 713955

Email: dkppkkr@gmail.com

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 08 Agustus 2025

Kepada :

No : 520 / 1383 / DKPP/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Tindak Lanjut Evaluasi  
AKIP Tahun 2024

Yth. Inspektur  
Kabupaten Kubu Raya  
di  
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 700.1.2.8 / 58 / Inspt tanggal 12 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, bersama ini disampaikan penjelasan atas rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya agar memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan evaluasi data kinerja	Sudah dilakukan (bukti terlampir)	teknologi informasi digunakan DKPP sejak Tahun 2023, tetapi hanya untuk pengumpulan data kinerja sedangkan evaluasi data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi.

Demikian disampaikan, atas perkenannya dan perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya

**AWALUDDIN, SP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740520 200003 1 005

Lampiran 1.

1. Pengumpulan Data Kinerja (PENDAKI) dengan bukti dukung sebagai berikut:

No	Aktivitas	Bobot	Bukti Dukung	Jadwal
1	Menyusun Dokumen RKA/DPA	10%	Foto DPA usulan atau DPA final	Triwulan 1
2	Menyusun SK PPTK/PPK/PA/CPCL atau Surat usulan SK dll	15%	Foto SK atau foto usulan surat SK	Triwulan 1
3	Menyelenggarakan rapat pertama dalam sub kegiatan / pertemuan pembagian tugas / sosialisasi / monitoring / evaluasi / koordinasi / disposisi atasan untuk memulai pekerjaan dll	25%	Foto rapat, Foto Disposisi	Triwulan 2
4	Menyusun dokumen perencanaan / melaksanakan diskusi pendahuluan / naskah NPHD dll		Foto cover dokumen atau foto rapat	
4	Pemesanan Barang/Jasa (pertama) dalam sub kegiatan atau pelaksanaan tender atau penandatanganan SPK dll	15%	Foto surat pemesanan, foto cover SPK	Triwulan 3
5	Selesai pengadaan barang/jasa (terakhir) dalam sub kegiatan atau pembuatan laporan kegiatan atau diskusi akhir atau rapat terakhir dalam sub kegiatan pengawasan pekerjaan fisik dll	35%	Foto fisik barang, Foto kuitansi, Foto sampul kontrak, Foto tempat diklat, foto cover laporan	Triwulan 4
Jumlah		100%		

2. Tampilan (screen shoot) aplikasi pengumpulan data kinerja (Pendaki) sebagai berikut:





Nomor : 700.1.2.8/ 58 /Inspt  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2024

Sungai Raya, 12 Juni 2025

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
di -  
Sungai Raya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
  - a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan terhadap keberadaan, kualitas dan pemanfaatan atas kelengkapan Dokumen pendukung pada komponen yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Tim evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Setiap Sub Komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir disetiap komponen)

4. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperoleh nilai sebesar 70,30 dengan interpretasi predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
A	Perencanaan Kinerja	30	22,20	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	19,20	19,20
C	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50
D	Evaluasi Kinerja	25	17,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,40	70,30

5. Rekomendasi :

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2024, kami merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan evaluasi data kinerja.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Inspektur Daerah,



Hardito, Ak.MM, CA, CFA, CGCAE  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19720627 199302 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kubu Raya; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Lampiran :

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2024 Dinas  
Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Komponen	Bobot (%)	Sub Komponen	Hasil Penilaian (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	Perencanaan Kinerja (30%) meliputi :	23,10
			a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia.	5,40
			b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).	7,20
			c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	10,50
2	Pengukuran Kinerja	30	Pengukuran Kinerja (30%) meliputi :	19,20
			a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.	4,20
			b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	4,50
			c. Pengukuran kinerja telah dijadikan reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	10,50
3	Pelaporan Kinerja	15	Pelaporan Kinerja (15%) meliputi :	10,50
			a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.	2,10
			b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya.	3,15
			c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi, kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	5,25

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) meliputi : a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan. b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	17,50 3,50 5,25 8,75
	Total	100		70,30

Inspektur Daerah,

